LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KECAMATAN KERTOSONO

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami munajatkan kehadlirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kertosono Tahun 2025. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2025 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kertosono Tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Kertosono dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Kertosono. Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Kertosono, 03 Maret 2026

CAMAT KERTOSONO



WIDI CAHYONO, SSTP, M.SI

Pembina Tingkat I

NIP. 19790516 199810 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawabserta berorientasi kepada hasil (*result oriented governement*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2025, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, wajib menyusun LKjIP.Informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas setiap organisasi perangkat daerah.

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, dan mewujudkan, mendukung sasaran pembangunan daerah "**Meningkatkan reformasi birokrasi yang akuntabel",** maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sesuai Rencana Strategis Kecamatan Kertosono.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator dengan capaian seperti dalam tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Kinerja Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	**90**	**91,22**	**101,36%**

2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	**30**	**37,89**	**126,30%**

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Kinerja Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	**78**	**72,02**	**92,33%**
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)	Renstra 2025-2029	**91**	**91,4**	**100,44%**
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan (%)	Renstra 2025-2029	**32**	**29,47**	**92,09%**
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)	Renstra 2025-2029	**78**	**92,31**	**118,35%**

Keseluruhan anggaran (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) pada Kecamatan Kertosono pada tahun 2025 sebesar 5.710.088.789,00**,-** telah terserap sebesar 86,78% atau sejumlah Rp4.955.350.257,01

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
b. Maksud dan Tujuan
c. Landasan Hukum
d. Gambaran Umum
e. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
f. Isu-isu Strategis (Strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi
g. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA
a. Ikhtisar / Ringkasan Renstra/Renja
b. Perjanjian Kinerja pada Tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan 2023
A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Dokumen Restra
A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional Minimal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten yang Berbatasn)
A.5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja
A.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
A.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP
Lampiran-lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan good governanct, diperlukanpengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepadaatasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilaian akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepalapemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintahyang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LkjIP Kecamatan Kertosono Tahun 2025 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Kertosono bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Review Rencana Strategis Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029. Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Kertosono merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja,Pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah :

Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

a) Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalanpelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
b) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
c) Mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penyampaian informasi kinerja yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024–2026.
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025–2029;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/350/K/411.013/2025 tentang PErubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

D. Gambaran umum Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk

Batas Wilayah Kecamatan Kertosono meliputi :

- Sebelah Utara : Kecamatan Patianrowo
- Sebelah Timur : Sungai Brantas
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ngronggot
- Sebelah Barat : Kecamatan Baron

Kecamatan Kertosono memiliki luas wilayah 2.267,5 Ha yang sebagian besar terdiri dari kawasan permukiman dan Bangunan & Halaman seluas 839,5 Ha,lahan sawah 1.188,5 Ha lahan kering seluas 183,5 Ha dan lainnya seluas 56,4 Ha.

Secara Administratif Kecamatan Kertosono terdiri dari 13 Desa dan 1 (satu) Kelurahan terdiri atas 166 RW (Rukun Warga) dan 327 RT (Rukun Tetangga) :

Tabel 1
Jumlah RT dan RW di Wilayah Kecamatan Kertosono

No.	Desa	Jumlah		Jumlah
		RT (RUKUN TETANGGA)	RW (RUKUN WARGA)	
1	2	3	4	5=(3+4)
1.	DRENGES	50	22	72
2.	JUWONO	12	6	18
3.	BANGSRI	12	6	18
4.	KALIANYAR	10	5	15
5.	TANJUNG	21	10	31
6.	NGLAWAK	38	14	52
7.	KEPUH	23	10	33
8.	TEMBARAK	25	10	35
9.	PELEM	48	17	65
10.	KUTOREJO	11	5	16
11.	BANARAN	18	42	60
12.	LAMBANGKUNING	16	8	24
13.	PANDANTOYO	16	5	21
14.	KUDU	27	6	33
JUMLAH		327	166	493

Sumber Data SIAK Kertosono 2025

Tabel 2
Jumlah penduduk di Wilayah Kecamatan Kertosono

No.	Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah (L + P)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	DRENGES	4.604	4.376	8.980
2.	JUWONO	1.226	1.185	2.411
3.	BANGSRI	1.448	1.399	2.848
4.	KALIANYAR	1.273	1.224	2.496
5.	TANJUNG	2.251	2.215	4.466
6.	NGLAWAK	3.223	3.129	6.352
7.	KEPUH	1.619	1.646	3.265
8.	TEMBARAK	2.228	2.229	4.458
9.	PELEM	3.870	3.867	7.736
10.	KUTOREJO	1.378	1.364	2.742
11.	BANARAN	3.253	3.280	6.534
12.	LAMBANGKUNING	1.851	1.763	3.614
13.	PANDANTOYO	2.051	2.066	4.117
14.	KUDU	2.163	3.144	5.307
JUMLAH		32.439	32.887	65.326

Sumber Data SIAK Kertosono 2025

Tabel 2
Luas Wilayah Kecamatan Kertosono

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)	Keterangan
1	DRENGES	448,09	
2	JUWONO	117,00	
3	BANGSRI	93,22	
4	KALIANYAR	134,60	
5	TANJUNG	204,49	
6	NGLAWAK	255,00	
7	KEPUH	170,58	
8	TEMBARAK	111,47	
9	PELEM	248,00	
10	KUTOREJO	52,32	
11	BANARAN	99,00	
12	LAMBANGKUNING	129,45	
13	PANDANTOYO	199,80	
14	KUDU	86,50	
	Jumlah	2.349,52	

Sumber Data SIAK Kertosono 2025

a. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Kertosono adalah :

1. Tugas Pokok

   Tugas pokok Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

   Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

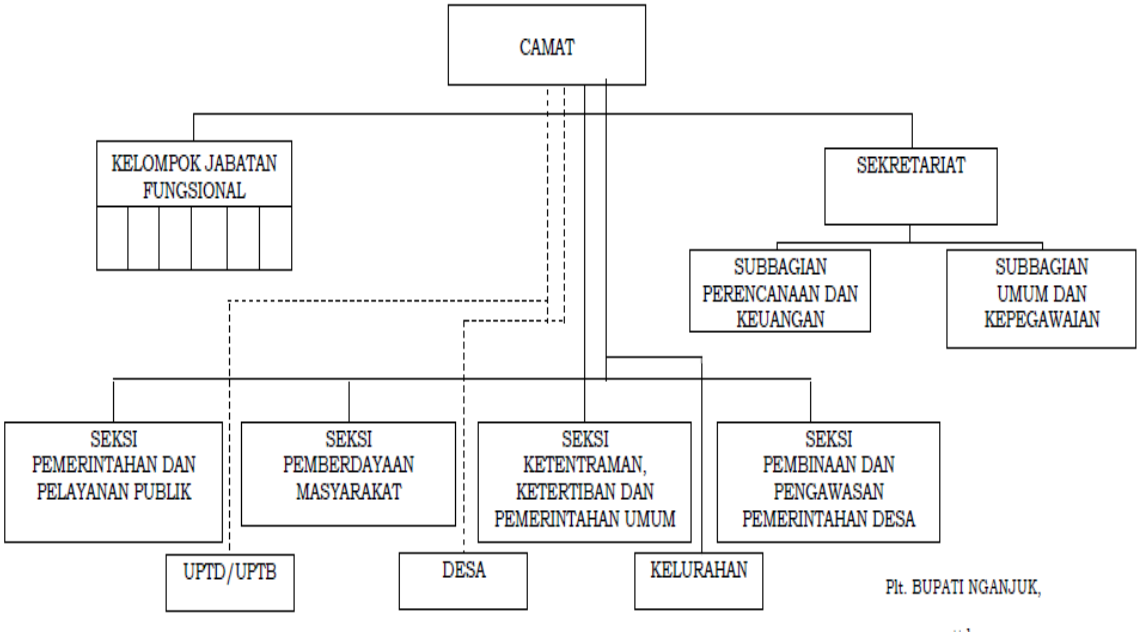
   a. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   b. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
   c. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang - undangan;
   d. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
   e. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
   f. Pengoordinasian penyelenggaraan partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
   g. Pelaksanaan Pembina Tingkat Ian penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
   h. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
   i. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
   j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk terdiri dari:

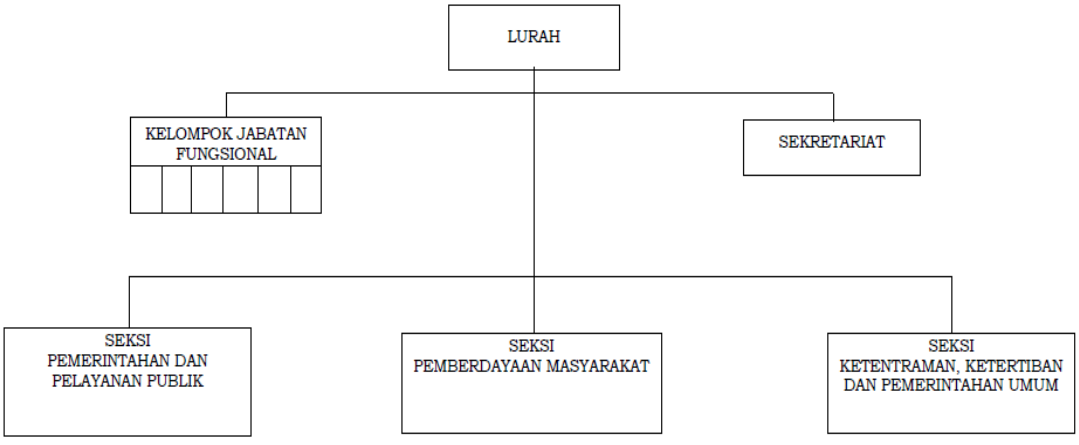
a. Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN BANARAN
KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK



1) CAMAT

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah :

a. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan;
b. Pengoordinasian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan;
c. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum;
d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat;
e. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa/Kelurahan;
f. Pengoordinasian Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
g. Pengoordinasian Penerapan Dan Penegakan Perda Dan Perkada;
h. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah; dan
i. Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomnendasi Dan Koordinasi Pembina Tingkat Ian Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan Pembina Tingkat Ian dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Rencana Program, Pengendalian Dan Pengevaluasian Pelaksanaan Teknis;
b. Pengelolaan Urusan Keuangan;
c. Pelaksanaan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Kepegawaian Dan Tata Usaha Perlengkapan;
d. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga; Dan
e. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Camat Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

2.1. Subbagian Perencanaan Dan Keuangan

Subbagian Keuangan Mempunyai Tugas:

a) Melaksanakan Perencanaan Anggaran Pembiayaan;
b) Melaksanakan Pengelolaan Keuangan;
c) Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan; Dan

d) Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Sekretaris Sesuai Dengan Tugasnya.

2.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) Mengelola Urusan Surat Menyurat, Ekspedisi Dan Kearsipan;
b) Mengelola Urusan Rumah Tangga Dan Keprotokolan;
c) Mengurus Administrasi Perjalanan Dinas Dan Tugas-Tugas Hubungan Kemasyarakatan;
d) Melaksanakan Dan Mengelola Urusan Perlengkapan;
e) Melaksanakan Ketatalaksanaan, Pengelolaan Dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
f) Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan; dan melaksanakan tugas-tugas tain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3) SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. Melaksanakan Pengoordinasian/Pensinergian Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait;
b. Melaksanakan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan;
c. Melaksanakan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan;
d. Melaksanakan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan;
e. Melaksanakan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan;
f. Melaksanakan Pengoordinasian/Pensinergian Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Umum;
g. Melaksanakan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta;
h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan;
i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan;
j. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan; Dan

4) SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. Melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
b. Melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. Melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. Melaksanakan evaluasi kelurahan; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) SEKSI KETENTRAMAN KETERIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a. Melaksanakan Pembina Tingkat Ian wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. Melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. Melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. Melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan Pembina Tingkat Ian (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. Melaksanakan Pembina Tingkat Ian persatuan dan persatuan bangsa;
g. Melaksanakan Pembina Tingkat Ian kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

h. Melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. Melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

a. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. Melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. Melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk terdiri dari :

a. Lurah
b. Sekretaris Kelurahan
c. 3 (tiga) Seksi yaitu, Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum.

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kecamatan Kertosono dan Kelurahan Banaran adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Kertosono dan Kelurahan Banaran sebanyak 13 (tiga belas) jabatan, yang terisi sebanyak 11 (sebelas) jabatan struktural dan 2 (dua) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 10 (sepuluh) orang staf fungsional umum. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Kertosono
Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah Pejabat	Jumlah Jabatan
1.	Camat	III-A	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	III-B	1	1
3.	Kepala Seksi	IV-A	3	4
4.	Kasubbag	IV-B	1	2
5.	Lurah	IV-A	1	1
6.	Sekretaris Kelurahan	IV-B	1	1
7-	Kasi di Kelurahan	IV-B	3	3
8.	Pelaksana di Kecamatan	-	11	
9.	Pelaksana di Kelurahan	-	1	
10.	PPPK di Kecamatan	-	1	
11.	PPPK di Kelurahan	-	4	
Jumlah			**28**	

a. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Kertosono sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Kertosono
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2025

No.	Pangkat	Golongan Ruang		Jumlah Pe
1.	Pembina Tingkat 1	IV/b		1
2.	Penata Tingkat I	III/d		8
3.	Penata	III/c		2
4.	Penata Muda Tk. I	III/b		1
5.	Penata Muda	III/a		6
6.	Pengatur Tk. I	II/d		2
7.	Pengatur	II/c		3
8.	Pengatur Muda Tk. I	II/b		0
9.	PPPK	V		5
Jumlah				**28**

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat pegawai Kecamatan Kertosono dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Kertosono
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2025

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	1
2.	S1	10
3.	D3	0
4.	SMA	17
5.	SMP	0
	JUMLAH	**28**

2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 4 (empat) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
   Roda dua sebanyak 2 (dua) Unit yaitu Honda Supra X125 Tahun 2007 dan Yamaha Vixion Tahun 2014

4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :

Meja Kerja	:	25 buah
Meja layanan	:	3 buah
Kursi	:	115 buah
Bangku Panjang	:	2 buah
Komputer khusus KTP SIAK	:	2 Unit
Komputer	:	5 Unit
Laptop	:	7 Unit
Mesin Ketik	:	-
Printer	:	4 Unit
Telepon	:	1 (satu) unit
TV	:	2 Unit
Kursi Sofa	:	3 Unit
CCTV	:	9 Unit/Titik

Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Kertosono menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Kertosono;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Kertosono yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
3) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan.
4) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain, Koramil, Polsek dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih kurang. • Belum optimalnya akuntabilitas kinerja kecamatan • Sinkronisasi perencanaan dan program masih lemah	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah • Forum koordinasi belum dimanfaatkan secara maksimal • Keterbatasan kapasitas SDM aparatur • Sistem informasi dan data belum terintegrasi • Komitmen lintas sektor yang belum seragam
		Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa. • Belum jelasnya pembagian peran dan tanggung jawab • Keterbatasan kapasitas dan jumlah SDM • Rendahnya komitmen dan kesadaran lintas sektor

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Kertosono, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

c. Isu-isu Strategis (Strategic issued) yang sedang dihadapi Organisasi

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kertosono telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya

pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Kertosono, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
   Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.
   Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan.
3) Pelayanan Prima.
   Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;
4) Peningkatan Sinergitas Kecamatan.
   Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Kertosono guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhitisar / Ringkasan Renstra / Renja

Kecamatan Kertosono sebagai perangkat daerah bertugas untuk menjabarkan, melaksanakan dan mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 – 2026 yaitu :

1. NGANJUK AKUNTABEL

Tujuan	:	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik
Indikator Tujuan	:	Indeks Reformasi Birikrasi
Sasaran	:	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel dan efektif serta pelayanan publik yang prima
Indikator Sasaran	:	Indeks Pelayanan Publik

2, NGANJUK HARMONIS

Tujuan	:	Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya
Indikator Tujuan	:	Indeks Kesalehan Sosial
Sasaran	:	Meningkatnya penanganan konflik sosial serta ketentraman dan ketertiban umum
Indikator Sasaran	:	Presentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan selaku perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 mempunyai Tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut

Tujuan : Meningkatnya sinergitas Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator : Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu (PATEN), Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

Indikator : Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

Masing-masing sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja untuk Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel di bawah :

Tabel 2.1.1
Sasaran Kecamatan Kertosono
(Renstra 2024-2026)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan

Indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kertosono merupakan Indikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator),* yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 3 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.
Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.
Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk 2024-2026
Kecamatan Kertosono sebagai perangkat daerah bertugas untuk menjabarkan, melaksanakan dan mewujudkan visi , misi ,Tujuan dan sasaran beserta indicator kinerja RPJMD Tahun 2025-2029 :

Tabel 2.1.2.1
Visi dan Misi, serta Tujuan dan Sasaran beserta Indikator Kinerja

No.	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat	Misi ke1 Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran		Indeks Kesalehan Sosial
				Meningkatnya kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
		Misi ke 2 Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi
				Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik
		Misi ke 4 Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya Manusia yag berkualitas	Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan		Tingkat Kemiskinan
				Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa

Sedangkan Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan”, adapun sasaran yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan,
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan,
3. Meningkatnya tertib administrasi desa Desa

dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.2.2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kertosono
(Renstra 2025-2029)

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai)
	Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan (Nilai)
2.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan (%)
3.	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa (%)

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertosono 2025 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja terdiri dari dua sasaran strategis sebagai berikut :

1) Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2) Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

Tabel 2.2.1
Perjanjian Kinerja 2025 Berdasarkan Renstra 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terpadu (Paten)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	90
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Presentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	30%

Program		Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.583.395.866	APBD 2025
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	130.705.000	APBD 2025
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	590.199.439	APBD 2025
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	109.988.200	APBD 2025
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	49.900.000	APBD 2025
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	414.793.300	APBD 2025
	JUMLAH	**5.878.981.805**	

Tabel 2.2.1

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	78
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik di Kecamatan	91
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	32
4.	Meningkatnya tertib Administrasi Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	78

	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.472.671.603	APBD 2025
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	109.848.450	APBD 2025
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	471.201.439	APBD 2025
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	102.629.000	APBD 2025
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	20.400.000	APBD 2025
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	325.444.400	APBD 2025
	JUMLAH	**5.502.194.892**	

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp **5.878.981.805**,- (*Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puliuh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah*) sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. Namun setelah perubahan anggarannya sebesar Rp. **5.502.194.892**,- (*Lima Milyar Lima Ratus Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)*

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kertosono merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Kertosono untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kertosono Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program kegiatan dan sub kegiatan dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian Indikator Kinerja berdasarkan Renstra 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Kertosono Tahun 2025 dalam pelaksanaan Renstra 2024 -2026 , rumus yang dipergunakan adalah

1. Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) kepada Masyarakat

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi E Sukma}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1 dikurangi Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1}} \times 100\ \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Kertosono menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :

Untuk mengukur capaian Indikator Kinerja berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan Tahun 2025, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi E Sukma}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1 dikurangi Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran trantibum Th N-1}} \times 100\ \%$$

4. Meningkatnya tertib administrasi desa

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah Desa Tertib Administrasi}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\ \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Kertosono menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian

rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut :

Kriteria Ketercapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah

No.	Interval Nilai Capaian	Kriteria
1	≥ 91 %	Tercapai
2	80% ≤ 90%	Tercapai dengan Catatan
3	< 80%	Tidak Tercapai

Sumber : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 000.8.6.3/304/411.000/2026 tanggal 02 Februari 2026 tentang Revisi SE Penyusunan LKJIP TA. 2025

Capaian kinerja Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.
Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi terhadap pencapaian target kinerja.

A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target dan Realisasi Kinerja pada tahun 2025 ada pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.1. Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2025

No	Tujuan, Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	**Renstra 2024-2026**	90	91,22	101,36%
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	**Renstra 2024-2026**	30	37,89	126,30%
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	**Renstra 2025-2029**	78	72,02	92,33%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	**Renstra 2025-2029**	91	91,40	100,44%

3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	**Renstra 2025-2029**	32	29,47	92,09%
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	**Renstra 2025-2029**	78	92,31	118,35%

Dari Tabel diatas dapat kita simpulkan berdasarkan Renstra 2024-2026 bahwa,

1. Sasaran Strategis Kesatu adalah Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),

HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KECAMATAN KERTOSONO
TAHUN 2025
(Berdasarkan Renstra 2024-2026)

No.	JUMLAH RESPONDEN				Jumlah	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)				JUMLAH	IKM TAHUN 2025
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7+8+9)	12=11/3
1	118	109	110	0	337	91,38	90,40	91,87	0,00	273,65	91,22

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun Anggaran 2025, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kertosono sebesar 91,22 dari target yang ditetapkan sebesar 90,00**,** sehingga capaian kinerja mencapai 101,36%.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kertosono berada pada kategori “Sangat Baik”, sebagaimana klasifikasi IKM sesuai ketentuan yang berlaku.

Pencapaian ini didukung oleh peningkatan kedisiplinan aparatur, penyederhanaan prosedur pelayanan, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan, serta peningkatan kompetensi petugas pelayanan.

Ke depan, upaya perbaikan pelayanan akan terus dilakukan melalui inovasi pelayanan, peningkatan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat, serta penguatan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Indek Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 91,22 dari target sebesar 90,00 sehingga diperoleh Capaian Kinerja sebesar 101,36%

Yang diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target Tahun 2025}} \times 100\% = \frac{91,22}{90,00} \times 100\% = 101,36\%$$

Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Kertosono melebihi target :

a). Persyaratan (U1)

Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai dengan regulasi yang berlaku terealisasi 91,01 %.

b). Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Kertosono sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat terealisasi 87,70 %.

c). Waktu Penyelesaian (U3)

Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi yang terkadang error sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan terealisasi 88,99 %.

d). Biaya/Tarif (U4)

Biaya dalam pengurusan surat – surat dan Pelayanan di Keacamatan Kertosono tidak dikenakab biaya/gratis terealisasi 99,89 %.

e). Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)

Jenis-jenis Pelayanan di Kecamatan Kertosono antara lain :

1. Pembuatan Akte Kelahiran
2. Pembuatan Kartu Keluarga
3. Perekaman KTP
4. Pelayanan Pindah tempat
5. Pembuatan dispensasi nikah
6. Pembuatan PPAT
7. Pelayanan Hak Waris
8. Pelayanan rekomendasi kredit bank
9. Pelayanan Legalisasi surat surat

Untuk jenis Pelayanan mencapai 89,10 %.

f). Kompetensi Pelaksana (U6)

Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek dan Sosialisasi, terealisasi 89,44 %.

g). Perilaku Pelaksana (U7)

Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan terealisasi 92,13 %.

h). Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)
Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N LAPOR terealisasi 100,00 %.

i). Sarana dan Prasarana (U9);
Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Kertosono sudah tersedia dengan kondisi yang baik terealisasi 91,18 %.

Berdasarkan Hasil dari Capian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kertosono Kecamatan Kertosono tahun 2025 terealisasi 91,22% dengan ini dapat dikatakan bahwa berdasarkan Kriteria Ketercapaian target tercapai, dengan kategori predikat sangat tinggi.

2. Sasaran Strategis Kedua adalah meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan realisasi sebesar 37,89 % dari target sebesar 30 %. Dengan demikian capaian kinerjanya 126,30 % maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sasaran strategis tersebut target tercapai, dengan kategori predikat sangat tinggi.

DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN KERTOSONO
TAHUN 2025
(Berdasarkan Renstra 2024-2026)

NO	NAMA KEJADIAN	TAHUN		TAHUN 2025			JUMLAH TAHUN 2025
		2023	2024	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Pencurian	5	7	0	1	1	2
2.	Kekerasan/Perkelahian	1	1	0	2	2	4
3.	Penipuan	7	1	0	0	0	0
4.	Narkoba/Miras	15	15	7	0	6	13
5.	Perjuadian	0	0	1	2	0	3
6.	Kecelakaan Lalu Lintas	100	68	5	22	7	34
7.	Kejadian Lain-Lain	2	3	0	2	1	3
JUMLAH		**130**	**95**	**13**	**29**	**17**	**59**

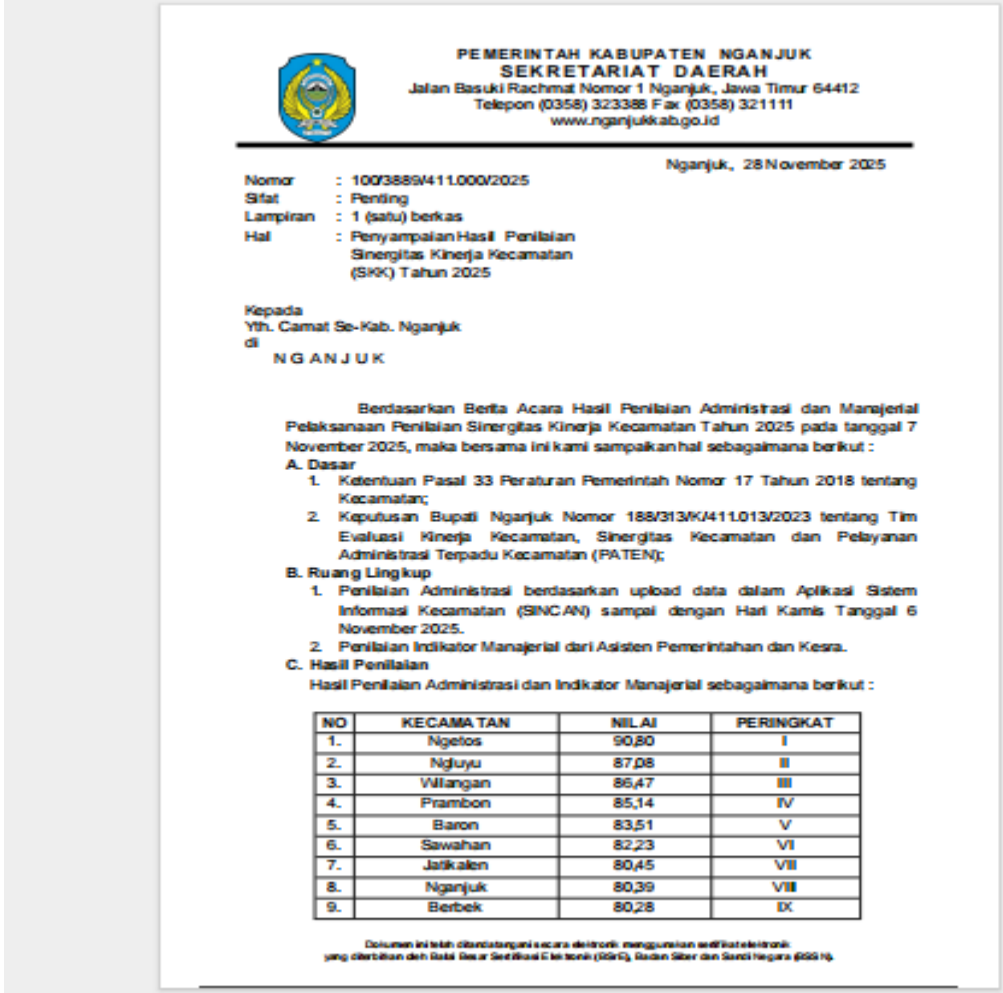
Angka tersebut dapat diperoleh dari :
Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2024 sejumlah 95 Laporan dan Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2025 sejumlah 59 Laporan,
Dengan demikian realisasi Kinerjanya :

$\frac{95 - 59 = 36}{95} \times 100 =$ **37,89 %**

Sedangkan Capaiannya = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{37,89}{30} \times 100\% =$ **126,30 %**

Dari Tabel diatas dapat kita simpulkan berdasarkan Renstra 2025-2029 bahwa,

1. Tujuan Strategis adalah meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan target nilai 78 namun realisasinya hanya 72,02 dengan capaian kinerja **92.33%** ini didapat dari hasil penilaian Sinergitas Kecamatan sebagaimana surat dari Sekretariat Daerah Nomor : 100/3889/411.000/2025 dengan ini dapat dikatakan bahwa target tercapai.



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Nganjuk, Jawa Timur 64412
Telepon (0358) 323388 Fax (0358) 321111
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 28 November 2025

Nomor : 100/3889/411.000/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) Tahun 2025

Kepada
Yth. Camat Se-Kab. Nganjuk
di
NGANJUK

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Administrasi dan Manajerial Pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025 pada tanggal 7 November 2025, maka bersama ini kami sampaikan hal sebagaimana berikut :

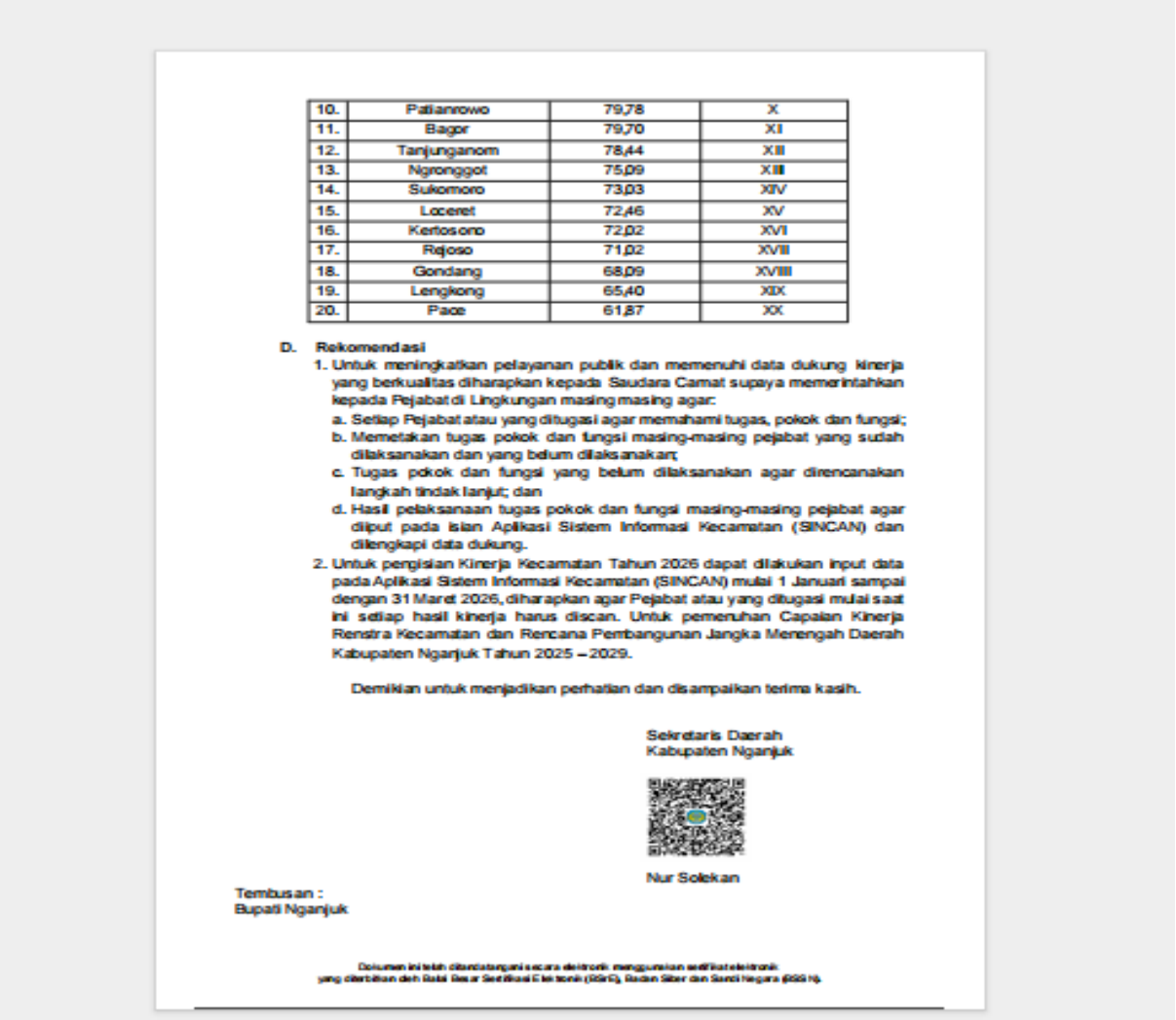
A. Dasar
1. Ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
2. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/313/KPTS/411.013/2023 tentang Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan, Sinergitas Kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

B. Ruang Lingkup
1. Penilaian Administrasi berdasarkan upload data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) sampai dengan Hari Kamis Tanggal 6 November 2025.
2. Penilaian Indikator Manajerial dari Asisten Pemerintahan dan Kesra.

C. Hasil Penilaian
Hasil Penilaian Administrasi dan Indikator Manajerial sebagaimana berikut :

NO	KECAMATAN	NILAI	PERINGKAT
1.	Ngetos	90,80	I
2.	Ngluyu	87,08	II
3.	Wilangan	86,47	III
4.	Prambon	85,14	IV
5.	Baron	83,51	V
6.	Sawahan	82,23	VI
7.	Jatikalen	80,45	VII
8.	Nganjuk	80,39	VIII
9.	Berbek	80,28	IX

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



10.	Patianrowo	79,78	X
11.	Bagor	79,70	XI
12.	Tanjunganom	78,44	XII
13.	Ngronggot	75,09	XIII
14.	Sukomoro	73,03	XIV
15.	Loceret	72,46	XV
16.	Kertosono	72,02	XVI
17.	Rejoso	71,02	XVII
18.	Gondang	68,09	XVIII
19.	Lengkong	65,40	XIX
20.	Pace	61,87	XX

D. Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi data dukung kinerja yang berkualitas diharapkan kepada Saudara Camat supaya memerintahkan kepada Pejabat di Lingkungan masing masing agar:
   a. Setiap Pejabat atau yang ditugasi agar memahami tugas, pokok dan fungsi;
   b. Memetakan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan;
   c. Tugas pokok dan fungsi yang belum dilaksanakan agar direncanakan langkah tindak lanjut; dan
   d. Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat agar diiput pada isian Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) dan dilengkapi data dukung.
2. Untuk pengisian Kinerja Kecamatan Tahun 2026 dapat dilakukan input data pada Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026, diharapkan agar Pejabat atau yang ditugasi mulai saat ini setiap hasil kinerja harus discan. Untuk pemenuhan Capaian Kinerja Renstra Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Nganjuk

Nur Solekan

Tembusan :
Bupati Nganjuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Sasaran Strategis Kesatu adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan,

   Indek Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 91,40 dari target sebesar 91,00 sehingga diperoleh Capaian Kinerja sebesar 100,44%.

   Faktor yang mempengaruhi Capaian IKM di Kecamatan Kertosono melebihi target :

   1) Persyaratan (U1)

      Persyaratan didalam pengurusan surat menyurat ataupun rekomendasi yang dilimpahkan kepada Camat bersifat paten sesuai dengan regulasi yang berlaku terealisasi 91,01 %.

   2) Sistem, Mekanisme dan prosedur (U2)

Sistim, mekanisme dan prosedur pelayanan di Kecamatan Kertosono sudah sesui dengan SOP yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat terealisasi 87,70 %.

3) Waktu Penyelesaian (U3)
   Waktu penyelesaian terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan karena terkendala beberapa factor contohnya Aplikasi yang terkadang error sehingga mengalami keterlambatan penyelesaian, untuk waktu penyelesaiaan terealisasi 88,99 %.
4) Biaya/Tarif (U4)
   Biaya dalam pengurusan surat – surat dan Pelayanan di Keacamatan Kertosono tidak dikenakab biaya/gratis terealisasi 99,89 %.
5) Produk sepesifikasi jenis pelayanan (U5)
   Jenis Pelayanan di Kecamatan Kertosono antara lain :
   a. Pembuatan Akte Kelahiran
   b. Pembuatan Kartu Keluarga
   c. Perekaman KTP
   d. Pelayanan Pindah tempat
   e. Pembuatan dispensasi nikah
   f. Pembuatan PPAT
   g. Pelayanan Hak Waris
   h. Pelayanan rekomendasi kredit bank
   i. Pelayanan Legalisasi surat surat

   Untuk jenis Pelayanan mencapai 89,10 %.
6) Kompetensi Pelaksana (U6)
   Kompetensi Pelaksana akan terus ditingkatkan dengan mengikuti Bimtek dan Sosialisasi, terealisasi 89,44 %.
7) Perilaku Pelaksana (U7)
   Didalam melayani Masyarakat selalu bersikap ramah dan sopan serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, perilaku pelayanan terealisasi 92,13 %.
8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)
   Penanganan pengaduan sudah dilaksanakan dan ditanggapi berdasarkan pengaduan yang masuk dari kotak saran maupun yang masuk ke SP4N LAPOR terealisasi 100 %.
9) Sarana dan Prasarana (U9);
   Sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Kertosono sudah tersedia dengan kondisi yang baik terealisasi 91,18 %.

Berdasarkan Hasil dari Capian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kertosono diatas Biaya yang Gratis/U4 , Perilaku Pelaksana (U7) dan Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8) memiliki nilai tertinggi dari Sembilan kategori Quisioner yang disampaikan kepada Masyarakat.
Berdasarkan Hasil dari Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kertosono Kecamatan Kertosono tahun 2025 terealisasi 91,40% dengan ini dapat dikatakan bahwa berdasarkan Kriteria Ketercapaian target tercapai, dengan kategori predikat sangat tinggi.

HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KECAMATAN KERTOSONO
TAHUN 2025
(Berdasarkan Renstra 2025-2029)

No.	JUMLAH RESPONDEN				Jumlah	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)				JUMLAH	IKM TAHUN 2025
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7+8+9)	12=11/4
1	118	109	110	184	521	91,38	90,40	91,87	91,95	365,60	91,40

3. Sasaran Strategis Kedua adalah meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan, dengan indikator Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan realisasi sebesar 29,47% dari target sebesar 32%. Capaian kinerjanya 92,09 % maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sasaran strategis tersebut target tercapai.
   Angka tersebut dapat diperoleh dari :
   Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2024 sebanyak 95 Laporan sedangkan Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun 2025 sejumlah 67 Laporan

DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN KERTOSONO
BERDASARKAN RENSTRA 2025-2029

NO	NAMA KEJADIAN	TAHUN		TAHUN 2025				JUMLAH TAHUN 2025
		2023	2024	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pencurian	5	7	0	1	1	2	4
2.	Kekerasan/Perkelahian	1	1	0	2	2	0	4
3.	Penipuan	7	1	0	0	0	0	0
4.	Narkoba/Miras	15	15	7	0	6	2	15
5.	Perjuadian	0	0	1	2	0	0	3
6.	Kecelakaan Lalu Lintas	100	68	5	22	7	4	38
7.	Kejadian Lain-Lain	2	3	0	2	1	0	3
JUMLAH		130	95	13	29	17	8	67

Dengan demikian realisasi Kinerjanya :

95 -67 = 28 X 100 = 29,47 %
95

Sedangkan Capaiannya = Realisai x 100 = 29,47 X100 = 92,09%
Target 32

Dengan ini dapat dikatakan bahwa target tercapai, dan dari segi capaian kinerja kategori predikat sangat tinggi.

4. Sasaran Strategis Ketiga adalah Meningkatnya tertib Administrasi Desa realisasi sebesar 92,31 % dari target sebesar 78 %. Capaian kinerjanya 118,35 % maka dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan sasaran strategis tersebut target capaian kinerjanya tercapai.

   Angka tersebut dapat diperoleh dari :

   Jumlah laporan Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2025 sebanyak 12 desa yang administrasi tertib dari 13 desa yabg ada di Kecamatan Kertosono dengan demikian realisasi kinerjanya :

   12 X 100% = 92,31 %
   13

   Sehingga Realisasinya = 92,31 %

   Sedangkan Capaian Kinerjanya = 92,31 x 100%=118,35%
   78

   Dengan ini dapat dikatakan bahwa target tercapai, dan dari segi capaian kinerja kategori predikat sangat tinggi.

REKAITULASI LAPORAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2025
KECAMATAN KERTOSONO

No	Kecamatan	Desa	Jenis Buku Administrasi Desa		Jumlah Desa	Update Buku Adm Desa			Ket.
						Tidak Diisi	Diisi Tidak Lengkap	Lengkap	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Kertosono	13 Desa	I. Buku Administrasi Desa	1. Buku Peraturan Di Desa;	13	0	1	12	
				2. Buku Keputusan Kepala Desa;	13	0	1	12	
				3. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;	13	0	1	12	
				4. Buku Aparat Pemerintah Desa;	13	0	0	13	
				5. Buku Tanah Kas Desa;	13	0	1	12	
				6. Buku Tanah di Desa;	13	2	5	6	

				7.	Buku Agenda;	13	0	2	11	
				8.	Buku Ekspedisi; dan	13	0	2	11	
				9.	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.	13	1	5	7	
				10.	Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa	13	1	5	7	
			II. Buku Administrasi Penduduk	1.	Buku Induk Penduduk	13	1	5	7	
				2.	Buku Mutasi Penduduk Desa	13	1	3	9	
				3.	Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	13	1	5	7	
				4.	Buku Penduduk Sementara	13	3	7	3	
				5.	Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga	13	4	7	3	
			III. Buku Administrasi Keuangan	1.	Buku APB Desa	13	0	2	11	
				2.	Buku Rencana Anggaran Biaya	13	0	1	12	
				3.	Buku Kas Pembantu Kegiatan	13	0	1	12	
				4.	Buku Kas Umum	13	0	1	12	
				5.	Buku Bank Desa	13	0	1	12	
				6.	Buku Kas Pembantu (Pajak)	13	0	3	10	
			IV. Buku Administrasi Pembangunan	1.	Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa	13	1	4	8	
				2.	Buku Kegiatan Pembangunan	13	0	4	9	
				3.	Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan	13	1	3	9	
				4.	Buku Kader Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat	13	2	5	6	
			V. Buku Administrasi Lainnya	1.	Buku Badan Permusyawaratan Desa dalam Buku Administrasi Badan Permusyawaratan Desa	13	0	3	10	
				1	Buku Agenda Surat Keluar	13	0	3	10	
				2	Buku Agenda Surat Masuk	13	0	4	9	
				3	Buku Expedisi	13	1	9	3	
				4	Buku Data Inventaris BPD	13	0	6	7	

				5 Buku Laporan Keuangan BPD	13	0	1	12	
				6 Buku Tamu BPD	13	0	0	13	
				7 Buku Data Anggota BPD	13	0	2	11	
				8 Buku Kegiatan BPD	13	0	5	8	
				9 Buku Data Aspirasi Masyarakat	13	0	1	12	
				10 Buku Daftar hadir rapat BPD	13	1	0	12	
				11 Buku Notulen rapat BPD	13	0	0	13	
				12 Buku data Peraturan/ Keputusan BPD	13	0	0	13	
				13 Buku Data Peraturan Desa	13	0	0	13	
				14 Buku Keputusan Musyawarah Desa	13	0	0	13	
				15 Buku Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	13	1	4	8	
				2. Kegiatan Musyawarah Desa dalam Buku Musyawarah Desa	13	4	5	4	
				3. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat	13	0	1	12	
J U M L A H						**24**	**113**	**397**	

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa desa yang mengisi buku administrasi desa yang lengkap dan tidak lengkap sebagai berikut :

No	Desa	Buku Administrasi Desa	
		Diisi lengkap	Diisi tidak lengkap
1.	**DRENGES**	√	
2.	**JUWONO**	√	
3.	**BANGSRI**	√	
4.	**KALIANYAR**	√	
5.	**TANJUNG**	√	
6.	**NGLAWAK**	√	
7.	**KEPUH**	√	
8.	**TEMBARAK**		√
9.	**PELEM**	√	
10.	**KUTOREJO**	√	
11.	**LAMBANGKUNING**	√	
12.	**PANDANTOYO**	√	
13.	**KUDU**	√	
Jumlah		**12**	**1**

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya (Tahun 2022 s/d 2024)

No.	Sasaran Strategis	Indiaktor Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Kinerja				Realisasi Kinerja			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3			4	5	6		7	8	9
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	**Renstra 2018-2023**	**86**	**90**	**-**	**-**	**76,04**	**82,81**	**-**	**-**
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	**Renstra 2018-2023**	**86**	**88**	**-**	**-**	**87,64**	**88,09**	**-**	**-**
3	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum	Prosentase hasil koordinasi di bidang pemerintahan, trantib, kesra, sarpras, dan pemberdayaan masyarakat	**Renstra 2018-2023**	**100**	**100**	**-**	**-**	**100**	**100**	**-**	**-**
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa Yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	**Renstra 2018-2023**	**96**	**100**	**-**	**-**	**100**	**86,42**	**-**	**-**
5	Meningkatnya Kelurahan yang tertib perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Prosentase Kelurahan Yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	**Renstra 2018-2023**	**100**	**100**	**-**	**-**	**100**	**100**	**-**	**-**
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	**Renstra 2024-2026**	**86**	**90**	**77**	**78**	**76,04**	**82,81**	**46,98**	**72,02**
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	**Renstra 2024-2026**	**86**	**88**	**88**	**90**	**86**	**87,64**	**90,41**	**91,22**
3	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	**Renstra 2024-2026**	**N/A**	**N/A**	**60**	**30**	**-**	**-**	**26,92**	**37,89**
1	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	**Renstra 2025-2029**	**86**	**90**	**77**	**78**	**76,04**	**82,81**	**46,98**	**72,02**
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	**Renstra 2025-2029**	**86**	**88**	**88**	**90**	**86**	**87,64**	**90,41**	**91,40**

3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	**Renstra 2025-2029**	**N/A**	**N/A**	**60**	**32**	**-**	**-**	**26,92**	**29,47**
4	Meningkatnya tertib administrasi desa Desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	**Renstra 2025-2029**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**78**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**92,31**

Dari Data Tabel diatas tidak semua sasaran bisa menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya masa Peralihan Renstra OPD dari Renstra 2024-2026 ke Renstra OPD 2025-2029.

Dari Tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa :

1. Sasaran strategis yang kesatu

   Realisasi Indek Kepuasan Masyarakat realisasi dari tahun 2023 s/d 2025 naik dari tahun ke tahun, di tahun 2023 nilai 87,64 di tahun 2024 sebesar 90,41 dan di tahun 2025 sebesar 91,40.

   Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan yang positif dan berkelanjutan. Peningkatan sebesar 3,76 poin dalam tiga tahun menandakan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik secara konsisten. Pada tahun 2024 dan 2025, nilai IKM telah mencapai kategori “Sangat Baik”, yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap layanan kecamatan.

   Kedepannya diperlukan strategi peningkatan kualitas berbasis inovasi dan digitalisasi pelayanan untuk menjaga tren positif serta mencegah stagnasi nilai.
2. Sasaran strategis yang kedua Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan, dengan indicator Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan pada tahun 2023 belum menjadi sasaran Strategis Kecamatan Kertosono dan di tahun 2024 terealiasi 26,92 % dari target 60% sedangkan pada tahun 2025 terealisasi 37,89% dari target 30% (Renstra 2024-2026) dan 32% (Renstra 2025-2029),

   Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa target tercapai disebabkan oleh kombinasi faktor perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, serta kondisi sosial masyarakat, serta dikarenakan target tahun 2025 lebih realistis dibanding tahun 2024.
3. Dan Sasaran strategis yang ketiga meningkatnya tertib administrasi desa, dengan indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Desa pada tahun 2023, 2024 belum menjadi sasaran Strategis Kecamatan Kertosono dan pada tahun 2025 terealisasi 92,31% dari target 78% (Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029), dengan kondisi seperti ini maka dapat dianalisis sebagai berikut :
   a) Tahun 2023–2024 indikator belum menjadi sasaran strategis sehingga belum menjadi fokus utama pengukuran kinerja.

b) Tahun 2025 indikator ditetapkan sebagai sasaran strategis, menunjukkan peningkatan komitmen terhadap tata kelola desa/tertib administrasi desa.
c) Capaian 92,31% dari target 78% (118,35%) menunjukkan kinerja sangat baik dan melampaui target.
d) Perlu penyesuaian target pada periode berikutnya agar lebih menantang dan mencerminkan kondisi riil.
e) Perlu evaluasi konsistensi penetapan target agar tidak terlalu tinggi (over ambitious) atau terlalu rendah (under estimate).

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra.

Tabel 3.1.3.1
Target Kinerja Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Renstra (Tahun)						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan**	**Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**Renstra 2024-2026**	**77**	**78**	**79**	**-**	**-**	**-**	
2.	**Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**Renstra 2024-2026**	**88**	**90**	**92**	**-**	**-**	**-**	
3.	**Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	**Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan**	**Renstra 2024-2026**	**60**	**30**	**35**	**-**	**-**	**-**	
1.	**Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**Indeks Sinergitas Kecamatan**	**Renstra 2025-2029**	**-**	**78**	**79**	**82**	**84**	**86**	**86**
2.	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan**	**Renstra 2025-2029**	**-**	**91**	**91,5**	**92**	**92,5**	**93**	**93**
3.	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**Renstra 2025-2029**	**-**	**32**	**35**	**40**	**45**	**50**	**50**
4.	**Meningkatnya tertib administrasi desa**	**Persentase Desa tertib administrasi desa**	**Renstra 2025-2029**	**-**	**78**	**80**	**82**	**85**	**87**	**87**

Tabel 3.1.3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Akhir Renstra -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	**Renstra 2024-2026**	**92**	**91,22**	**99,15%**
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	**Renstra 2024-2026**	**35**	**37,89**	**108,26%**
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	**Renstra 2025-2029**	**86**	**72,02**	**83,74%**
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	**Renstra 2025-2029**	**93**	**91,40**	**98,28%**
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	**Renstra 2025-2029**	**50**	**29,47**	**58,94%**
4.	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	**Renstra 2025-2029**	**87**	**92,31**	**106,10%**

Dari tabel Perbandingan antara realisasi kinerja tahun anggaran 2025 dengan target akhir Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029, dapat disimpulkan bahwa :

Berdasarkan Renstra 2024-2026

1. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik di kecamatan Kertosono pada tahun 2025 sebesar 91,22, dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2024-2026 sebesar 92 dengan tingkat kemajuan sebesar 99,15% yang diperoleh dari formula sebagai berikut:

   Realisasi Kinerja Tahun 2025 91,22
   ----------x 100% = -------- X 100 % = 99,15%
   Target pada akhir Renstra 92

   Tingkat kemajuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum mencapai 100 % , maka dapat dikatakan bahwa dalam hal peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Kertosono belum dapat terlaksana secara optimal.

Dengan ini dipandang perlu dan penting Kecamatan Kertosono kedepannya lebih meningkatkan pelayanan Ceria (Cepat, Efesien dan Efektif, Ramah, Iklhas, Akuntabel) sehingga respon baik dari masyarakat meningkat, yang mana dalam hal ini dibuktikan dengan hasil survey masyarakat melalui aplikasi E Sukma dengan hasil baik sesuai atau melebihi target.
Kedepannya Kecamatan Kertosono akan menaikkan target pelayanan publik dengan harapan pelayanan di Kecamatan Kertosono semakin baik.

2. Realiasasi meningkatkan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kertosono pada tahun 2025 sebesar 37,89% dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024-2026 sebesar 35 % maka tingkat kemajuannya sebesar 108,26%

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{37,89}{35} \times 100\ \% = 108,26\%$$

Berdasarkan Renstra 2025-2029

1. Realisasi Indeks Sinergitas Kecamatan (Nilai Tahun 2025 sebesar 72,02 dibandingkan dengan target akhir Tahun Renstra 2025-2029 sebesar 86 maka diperoleh Tingkat kemajuan sebesar 83,74% yang diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{72,02}{86} \times 100\ \% = 83,74\%$$

2. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan di kecamatan Kertosono pada tahun 2025 sebesar 91,40 dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2025-2029 sebesar 93 dengan tingkat kemajuan sebesar 98,28% yang diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Kinerja Tahun 2025}}{\text{Target pada akhir Renstra}} \times 100\ \% = \frac{91,40}{93} \times 100\ \% = 98,28\%$$

Tingkat kemajuan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum mencapai 100 % , namun dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam hal peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Kertosono sudah dapat terlaksana secara optimal.
Namun dari pada itu dipandang perlu dan penting Kecamatan Kertosono kedepannya lebih meningkatkan pelayanan Ceria (Cepat, Efesien dan Efektif,

Ramah, Iklhas, Akuntabel) sehingga respon baik dari masyarakat lebih meningkat, yang mana dalam hal ini dibuktikan dengan hasil survey masyarakat melalui aplikasi E Sukma dengan hasil baik sesuai atau melebihi target yang ditentukan. Kedepannya Kecamatan Kertosono akan menaikkan target pelayanan publik dengan harapan pelayanan di Kecamatan Kertosono semakin baik.

3. Realiasasi Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan di wilayah Kecamatan Kertosono pada tahun 2025 sebesar 29,47% dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 sebesar 50% maka tingkat kemajuannya sebesar 58,94%

   Realisasi Kinerja Tahun 2025 29,47
   ----------x 100% = -------- X 100% = 58,94%
   Target pada akhir Renstra 50

3. Realiasasi Persentase Desa tertib administrasi desa di wilayah Kecamatan Kertosono pada tahun 2025 sebesar 72,45 % dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 sebesar 87 % maka tingkat kemajuannya sebesar 83,28 %

   Realisasi Kinerja Tahun 2025 92,31
   ----------x 100 % = -------- X 100 % = 106,10 %
   Target pada akhir Renstra 87

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten Yang Berbatasan)

Tabel 3.1.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Standard Nasional (berdasarkan RPD 2024-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standard Provinsi	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Posisi Kinerja
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kab.Jombang 91,23	91,22	Dibawah
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase pen urunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	-	37,89	-

Dari tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Tingkat Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa :

Berdasarkan Renstra 2024-2026

1. Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) tahun 2025 adalah 91,22 dibandingkan dengan IKM Kabupaten Jombang sebesar 91,23 menunjukkan kinerja pelayanan sangat baik Hal ini mencerminkan keberhasilan kecamatan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
   Kedepannya Kecamatan Kertosono akan meningkatkan pelayanan sehingga harapannya Standar Pelayanan di Kecamatan Kertosono mampu melebihi Standart Kabupaten Jombang/Standar Provinsi Jawa Timur.
2. Realisasi kinerja Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dengan indikator persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 37,89% dibandingkan dengan Standart Nasional/Provinsi/Kabupaten berbatasan tidak ada pembandingnya.

Tabel 3.1.4.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025
dengan Standard Nasional (berdasarkan Renstra 2025-2029)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standard Nasional	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	-	72,02	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Kab.Jombang 91,23	91,40	Diatas
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	-	29,47	
4.	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	-	92,31	

Dari tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Tingkat Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa :

Berdasarkan Renstra 2025-2029

1. Realisasi kinerja Indeks Sinergitas Kecamatan adalah 72,02 dibandingkan dengan Standart Nasional tidak ada pembandingnya.

   Adapun bila dibandingkan dengan nilai rata-rata sinergitas di wilayah Kabupaten Nganjuk sebesar 82,87 Kecamatan Kertosono masih di bawah nilai rata-rata sinergitas Kabupaten Nganjuk, maka dapat dikatakan Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) belum optimal.

   Kedepannya agar target dapat tercapai, Kecamatan Kertosono akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

   a. Penguatan Perencanaan Terintegrasi
   b. Optimalisasi Koordinasi dan Komunikasi
   c. Penegasan Tugas dan Fungsi (Tupoksi)
   d. Penguatan Monitoring dan Evaluasi (Monev)
   e. Peningkatan Kapasitas SDM
   f. Digitalisasi Pelayanan dan Administrasi
   g. Penguatan Sinergi dengan Stakeholder serta Penerapan Reward dan Punishment

1. Realisasi kinerja Sasaran Strategis yang pertama meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan tahun 2025 adalah 91,40 % dibandingkan dengan IKM Kabupaten Jombang sebesar 91,23, Kecamatan Kertosono masih diatas standart Nasional, maka dapat dikatakan kinerja dalam pelayanan publik sudah optimal.

   Hal ini mencerminkan keberhasilan kecamatan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kedepannya Kecamatan Patianrowo akan meningkatkan pelayanan sehingga harapannya Standar Pelayanan di Kecamatan Patianrowo mampu melebihi Standar Provinsi Jawa Timur

2. Realisasi kinerja Sasaran Strategis yang kedua Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan pada tahun 2025 sebesar 29,47% dibandingkan dengan Standart Kabupaten berbatasan/Provinsi/Nasional tidak ada pembandingnya.

   Untuk kedepannya akan dikaji ulang tentang penentuan sasaran yang ada di dokumen perencanaan

3. Realisasi kinerja Sasaran Strategis yang ketiga Persentase Desa tertib administrasi desa pada tahun 2025 sebesar 92,31% dibandingkan dengan Standart Kabupaten berbatasan/Provinsi/Nasional tidak ada pembandingnya.

   Untuk kedepannya akan dikaji ulang tentang penentuan sasaran yang ada di dokumen perencanaan

A.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.5
Analisis Keberhasilan /Kegagalan Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Faktor Pendukung	Faktor penghambat	Alternatif Solusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	**Renstra 2024-2026**	90	91,22	101,36%	Faktor regulatif, manajerial, SDM, sarana prasarana, serta partisipasi masyarakat		
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase pen urunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	**Renstra 2024-2026**	30	37,89	126,30%	Sinergi antar lembaga, partisipasi masyarakat, dukungan regulasi, serta efektivitas sistem pengawasan dan pembinaan		
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraa n pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	**Renstra 2025-2029**	78	72,02	92,33%	Kolaborasi struktural (antar perangkat daerah), kolaborasi fungsional (antar seksi), dan kolaborasi sosial (dengan masyarakat) yang didukung kepemimpinan kuat, regulasi jelas, serta pengelolaan anggaran yang efisien.		
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	**Renstra 2025-2029**	91	91,40	100,44%	Faktor regulatif, manajerial, SDM, sarana prasarana, serta partisipasi masyarakat		
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	**Renstra 2025-2029**	32	29,47	92,09%	Sinergi antar lembaga, partisipasi masyarakat, dukungan regulasi, serta efektivitas sistem pengawasan dan pembinaan		
4	Meningkatnya tertib administrasi desa Desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	**Renstra 2025-2029**	78	92,31	118,35%	Dukungan Regulasi dan Kebijakan : a. Dukungan Regulasi dan Kebijakan b. Komitmen Kepala Desa dan Perangkat Desa c. Pembinaan dan Pendampingan Kecamatan d. Peningkatan Kapasitas SDM Desa e. Pemanfaatan Sistem Digitalisasi f. Dukungan Anggaran dan Pengawasan dan Evaluasi Berkala		

Dari tabel Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan dapat simpulkan bahwa :

Berdasarkan Renstra 2024-2026

1. Realisasi kinerja sasaran strategis yang kesatu meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kertosono pada tahun 2025 sebesar 91,22 diperoleh dari target 90 capaian kinerja 101,36% maka dapat dikatakan target tercapai. Adapaun penyebab keberhasilan dikarenakan dalam pelayanan telah dilakukan dengan baik yaitu dengan Motto Pelayanan Kecamatan Kertosono **"Ceria"**
   1. Cepat
   2. Efesien dan Efektif
   3. Ramah
   4. Iklhas
   5. Akuntabel

   Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kertosono telah berjalan efektif dan memenuhi harapan masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan profesionalisme petugas, penerapan standar pelayanan, serta perbaikan sistem administrasi pelayanan.

   Namun demikian, selisih capaian yang relatif kecil mengindikasikan perlunya upaya peningkatan berkelanjutan, terutama dalam menjaga konsistensi kualitas layanan dan meningkatkan inovasi pelayanan agar kepuasan masyarakat dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
2. Realisasi kinerja Sasaran Strategis yang kedua Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 37,89% diperoleh dari target 30% capaian kinerja 126,30% maka dapat dikatakan target tercapai,

   Capaian 126,30% menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan dalam menurunkan pelanggaran Trantibum tahun 2025 cukup efektif dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan:
   a) Koordinasi lintas sektor berjalan optimal.
   b) Pengendalian gangguan ketertiban semakin baik.
   c) Sistem respons dan pencegahan lebih efektif.

   Namun demikian, perlu evaluasi terhadap:
   a) Ketepatan penetapan target.
   b) Konsistensi metode pengukuran.
   c) Keberlanjutan strategi agar tidak terjadi rebound (kenaikan kembali).

Berdasarkan Renstra 2025-2029

1. Realisasi kinerja Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan indikator Indeks sinergitas Kecamatan adalah 72,02 dari target 78 dengan capaian kinerja 92,33%,

   Meskipun belum mencapai target, capaian kinerja 92,33% menunjukkan kinerja cukup baik dan mendekati target.

2. Realisasi kinerja Sasaran Strategis yang kesatu meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 91,40 diperoleh dari target 91 capaian kinerja 100,44% maka dikatakan dapat tercapai. Adapaun penyebab keberhasilan dikarenakan dalam pelayanan telah dilakukan dengan baik yaitu dengan Motto Pelayanan Kecamatan Kertosono "Ceria", Cepat, Efisien dan Efektif, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel

   Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kertosono telah berjalan efektif dan memenuhi harapan masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan profesionalisme petugas, penerapan standar pelayanan, serta perbaikan sistem administrasi pelayanan.

   Namun demikian, selisih capaian yang relatif kecil mengindikasikan perlunya upaya peningkatan berkelanjutan, terutama dalam menjaga konsistensi kualitas layanan dan meningkatkan inovasi pelayanan agar kepuasan masyarakat dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
3. Realisasi kinerja Sasaran Strategis yang kedua meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dengan indikator Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan pada tahun 2025 sebesar 29,47% diperoleh dari target 32 % capaian kinerja 92,09%.

   Realisasi penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud menunjukkan bahwa:
   a) Kinerja sudah baik dan efektif.
   b) Upaya pengendalian gangguan berjalan optimal.
   c) Namun masih terdapat kesenjangan kecil (2,53%) yang perlu diperbaiki melalui penguatan koordinasi, sistem deteksi dini, dan peningkatan kapasitas pengawasan.
4. Realisasi kinerja Sasaran Strategis yang ketiga meningkatnya tertib administrasi desa dengan indikator Persentase Desa tertib administrasi desa di wilayah Kecamatan pada tahun 2025 sebesar 92,31% diperoleh dari target 78% capaian kinerja 118,35%.

   Secara umum, indikator Meningkatnya Tertib Administrasi Desa Tahun 2025 dapat dikatakan/dinilai berhasil karena:
   a) Realisasi melampaui target (118,35%)
   b) Tingkat efisiensi baik (92,09%)
   c) Dampak substantif terhadap tata kelola desa/tertib administrasi desa

   Namun demikian, untuk peningkatan kualitas kinerja ke depan perlu:
   a) Penyusunan target yang lebih progresif,
   b) Fokus pembinaan pada desa yang belum tertib,
   c) Penguatan sistem monitoring berbasis digital.

A.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.6
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	101,35%	59,72%	41,63%
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase pen urunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	126,30%	59,72%	66,58%
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	92,33%	86,78%	5,55%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	100,44%	86,78%	13,66%
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Renstra 2025-2029	92,09%	86,78%	5,31%
4	Meningkatnya tertib administrasi desa Desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	Renstra 2025-2029	118,35%	86,78%	31,57%

Tingkat efisiensi = % capaian kinerja - % penyerapan anggaran

Dari tabel diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

Berdasarkan Renstra 2024-2026

1. Dari Sasaran Kesatu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan capaian kinerja sebesar 101,35% dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 59,72% sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula Prosentase Capaian Kinerja dikurangi dengan Realisasi Anggaran= 101,35 % – 59,72% = 41,63%.
   Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi *di* Kecamatan Kertosono dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun efesiensi ini disebabkan :
   a) Dengan keterbatasan jumlah Pegawai karena pensiun Pemerintah Kecamatan Kertosono tetap melaksanakan Pelayanan publik secara maksimal, sdehingga masyarakat mendapatkan pelayanan lebib baik lagi;

b) Rendahnya penyerapan Anggaran pada kegaiatan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, dikarenakan ada jabatan yang kosong yaitu Ka Sub Bag Umum dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan belum adanya Pejabat Camat Definitif mulai bulan Juni 2025 s/d Desember 2025

2. Untuk sasaran yang kedua, Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan capaian kinerjanya sebesar 126,30% dan Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 59,72%
   Dengan demikian diperoleh tingkat efisiensi sebesar 126,30% - 59,72% = 66,58% menunjukkan sudah adanya komitmen yang mendasar dari Kecamatan Kertosono, dalam melaksakan kinerja.

Dari tabel diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

Berdasarkan Renstra 2025-2029

1. Dari Tujuan Perangkat Daerah meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan dengan capaian kinerja 92,33% dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebesar 86,78% sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula capaian dikurangi dengan realisasi = 92,33% – 86,78% = 5,55%.
   Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi di Kecamatan Kertosono dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun efesiensi ini disebabkan :
   a. Dengan keterbatasan jumlah Pegawai karena pensiun Pemerintah Kecamatan Kertosono tetap melaksanakan pelayanan publik semaksimal mungkin sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan cukup baik dan senantiasa dievaluasi secara rutin dan berkala untuk perbaikan kedepannya;
   b. Rendahnya penyerapan Anggaran pada kegaiatan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, dikarenakan ada jabatan yang kosong yaitu Ka Sub Bag Umum dan Kepala Seksi PemberdayaanMasyarakat dan belum adanya Pejabat Camat Definitif mulai bulan Juni 2025 s/d Desember 2025;

   Secara umum, pelaksanaan tujuan perangkat daerah dalam meningkatkan sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan menunjukkan kinerja yang efisien, dengan selisih efisiensi sebesar 5,55%, yang mencerminkan penggunaan anggaran yang hemat namun tetap mampu mencapai target kinerja secara semaksimal mungkin.
2. Dari Sasaran Kesatu : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100,44% dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebesar 86,78% Sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula capaian dikurangi dengan Realisasi Anggaran = 100,44% – 86,78% = 13,66%. Hal ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi di Kecamatan Kertosono dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Adapun efesiensi ini disebabkan :
   a) Dengan keterbatasan jumlah Pegawai karena pensiun Pemerintah Kecamatan Kertosono tetap melaksanakan Pelayanan publik secara maksimal, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan lebib baik lagi;

b) Rendahnya penyerapan Anggaran pada kegaiatan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai, dikarenakan ada jabatan yang kosong yaitu Ka Sub Bag Umum dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan belum adanya Pejabat Camat Definitif mulai bulan Juni 2025 s/d Desember 2025.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan efektif dan efisien, serta mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam mendukung peningkatan pelayanan publik.

3. Untuk sasaran yang kedua, Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan Capaian Kinerjanya sebesar 92,09% dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebesar 86,78%

   Sehingga dapat diperoleh efisiensi dengan formula Capaian Kinerja dikurangi dengan Realisasi Anggaran = 92,09% - 86,78% = 5,31%. Hal ini menunjukkan adanya efisien yang cukup signifikan.

   Interpretasi Hasil :

   1. Capaian kinerja tinggi
      Tingkat capaian kinerja sebesar 92,09% menunjukkan bahwa program/kegiatan telah terlaksana dengan sangat baik dan mendekati target yang ditetapkan.
   2. Realisasi anggaran lebih rendah dari capaian.
      Realisasi anggaran sebesar 86,78% berarti tidak seluruh pagu anggaran digunakan, namun output yang dihasilkan tetap tinggi.
   3. Efisiensi positif (5,31%)
      Selisih positif sebesar 5,31% menunjukkan bahwa kinerja dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat dari proporsi capaian kinerjanya. Artinya, organisasi mampu menghasilkan output yang optimal tanpa harus menyerap seluruh anggaran secara maksimal.

4. Untuk sasaran yang ketiga, Meningkatnya tertib administrasi desa, adapun capaian kinerjanya sebesar 118,35% dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 sebesar 86,78% dengan demikian diperoleh tingkat efisiensi sebesar 118,35% - 86,78% = 31,57% menunjukkan sudah adanya komitmen yang mendasar dari Kecamatan Kertosono, dalam melaksakan kinerja, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan komitmen yang lebih baik dan terukur untuk kedepannya.

   Nilai efisiensi sebesar 31,57% (positif) menunjukkan bahwa:

   a) Output/kinerja yang dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan input anggaran yang digunakan.
   b) Program dinilai sangat efisien, karena dengan serapan anggaran 86,78% mampu menghasilkan capaian 118,35%.
   c) Terdapat nilai tambah (value for money) dalam pelaksanaan program.

A.7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Tabel : 3.1.7
Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.
(Berdasarkan Renstra 2024-2026)

No.	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2025		
						Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tujuan : Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	-	-	78	72,02	92,33%
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	-	-	90	91,22	101,36%
1.				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SAKIP Kecamatan*	75	70,60	94,13%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9 Dokumen	4,00	44,44%
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	2 Dokumen	2,00	100,00%
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,00	100,00%
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00%
				Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,00	100,00%
				Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00%

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	0,00	0,00%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0,00	0,00%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah	40 Dokumen	30,00	75,00%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan	27,00	67,50%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	0,00	0,00%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	0,00	0,00%
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	umlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0,00	0,00%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	0,00	0,00%
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0,00	0,00%
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18 Dokumen	11,00	61,11%
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00%
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah DokumenPengamanan Barang MilikDaerah SKPD	1 Dokumen	1,00	100,00%
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	0,00	0,00%

				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	0,00%
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9,00	75,00%
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,00	100,00%
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen HasilPemanfaatan Barang MilikDaerah SKPD	1 Dokumen	0,00	0,00%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Dokumen	2,00	25,00%
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0,00	0,00%
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	0,00	0,00%
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00	0,00%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00	0,00%
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0,00	0,00%
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	0,00	0,00%
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	180,00	90,00%
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	0,00	0,00%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah	54 Dokumen	42,00	77,78%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00%

				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8,00	66,67%
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0,00	0,00%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu	12 Laporan	9,00	75,00%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	8,00	16,00%
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	3,00	75,00%
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1,00	100,00%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Banaran)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	100,00%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Banaran)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	100,00%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Banaran)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Banaran)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Banaran)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Banaran)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	6,00	50,00%
				Penyediaan Bahan/Material (Kelurahan Banaran)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	17 Unit	4,00	23,53%
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	4,00	57,14%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	0,00%
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	0,00%

				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	0,00%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Banaran)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0,00	#DIV/0!
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Kelurahan Banaran)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0,00	#DIV/0!
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahaan Daerah	49 Laporan	27,00	55,10%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat	12 Laporan	9,00	75,00%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9,00	75,00%
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,00	0,00%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Banaran)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10,00	83,33%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Banaran)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10,00	83,33%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	42 Unit	19	45,24%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	2,00	66,67%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	0,00%
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihar	15 Unit	0,00	0,00%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	3,00	60,00%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1,00	50,00%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kelurahan Banaran)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	2,00	66,67%

				Pemeliharaan Mebel (Kelurahan Banaran)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	5,00	83,33%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Banaran)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	2,00	50,00%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kelurahan Banaran)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4,00	100,00%
	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	-	-	90	91,22	101,36%
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	100%	87,50	87,50%
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Laporan	2,00	100,00%
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2,00	100,00%
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	2 Laporan	2,00	100,00%
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	2,00	100,00%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama	4 Laporan	3,00	75,00%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	3,00	75,00%
3.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	100%	0,77	0,77%

				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	18 LembagaKemasyarakatan	18,00	100,00%
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 LembagaKemasyarakatan	9,00	100,00%
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	9 LembagaKemasyarakatan	9,00	100,00%
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0	0,00	#DIV/0!
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Aktif Dalam Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	150 Keluarga	120,00	80,00%
				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	150 Keluarga	150,00	100,00%
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0	0,00	0,00%
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonoomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	0,00	0,00%
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	21 LembagaKemasyarakatan	21,00	100,00%
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Banaran)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 LembagaKemasyarakatan	9,00	100,00%
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Banaran)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	1,00	50,00%

				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Banaran)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas /Ormas	8,00	80,00%
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	-	-	30	37,89	126,30%
4.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangan	100%	71,00	71,00%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24 Laporan	9,00	37,50%
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	9,00	75,00%
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	0,00	0,00%
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	9,00	75,00%
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	9,00	75,00%
5.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	100%	95,10%	95,10%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	9 Lembaga/ Organisasi Masyarakat	9,00	100,00%
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	100 Orang	96,00	96,00%

				Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Memantapkan Pengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	2,00	100,00%
6.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	ProsentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang	100%	55,00	55,00%
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang	14 Desa/Kelurahan/23 Dokumen	14	100,00%
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	7,00	77,78%
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Des	8 Dokumen	4,00	50,00%
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	1,00	50,00%
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Banaran)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	3,00	75,00%

Berdasarkan Renstra 2024-2026

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui dan dijelaskan hal-hal terkait Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Kertosono sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , terkait dengan Nilai SAKIP Kecamatan dari target Nilai 75 tercapai Nilai 70,60
   Dengan ini menunjukan capaian kinerja sebesar 94,13%
   Adapun kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari target 9 Dokumen realisasi sebanyak 4 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 44,44%
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target 40 Dokumen realisasi sebanyak 30 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 75,00%
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dari target 18 Dokumen realisasi sebanyak 11 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 61,11%
d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat dari target 8 Dokumen realisasi sebesar 2 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 25,00%
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target 54 Dokumen realisasi sebanyak 42,00 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 77,78%
f. Pengadaan Barang Milik Daerah dari target 17 Unit realisasi sebanyak 4 Unit, hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 23,53%
g. Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah dari target 49 Laporan realisasi sebesar 27 Laporan hal ini menunjukan capaian kenerja sebesar 55,10%
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah dari target 42 Unit realisasi sebesar 19,00 Unit hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 45,24%

Walaupun capaian indikator program mencapai 94,13% (kategori baik), namun secara substantif masih terdapat kelemahan pada kegiatan strategis penunjang tata kelola.

Ketidakseimbangan antara capaian administratif operasional dan capaian manajemen kinerja menjadi faktor utama belum tercapainya target Nilai SAKIP 75. Jika dilakukan penguatan pada aspek perencanaan, evaluasi, dan administrasi kepegawaian, maka target nilai SAKIP berpotensi tercapai bahkan meningkat pada tahun berikutnya.

2. Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik dari target 100,00% realisasinya 87,50% sehingga capaian kinerjanya 87,50%.

Adapun kegiatan dari Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik capaiannya Adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dari target 2 Laporan realisasi 2 laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100,00%
b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dari target 2 Laporan realisasi 2 laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100,00%

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dari target 4 Laporan realisasi 3 laporan 75,00%

Analisis Kinerja Secara Keseluruhan secara umum, Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik berjalan cukup baik**,** namun belum optimal karena 2 kegiatan tercapai 100%, 1 kegiatan hanya tercapai 75%, Capaian program berhenti di angka 87,50%

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari target 100 % realisasinya 77,00% sehingga capaian kinerjanya 77,00%.

   Hal ini menunjukan kegiatan ini sudah mencapai target sesuai dengan yang telah ditentukan.

   Adapun kegiatanya dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu :

   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dari target 18 Lembaga tercapai 18 Lembaga sehingga capaian kinerjanya 100,00%

      Hal ini menunjukan kegiatan ini target sudah tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan

   b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dari target 150 Keluarga hanya tercapai 120 Keluarga sehingga target hanya tercapai 80,00%

   c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dari target 0 Keluarga hanya tercapai 0 Keluarga sehingga target hanya tercapai 0,00%

   d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan target 21 Lembaga Kemasyarakatan realisasi sebanyak 21,00 Lembaga Kemasyarakatan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar Walaupun beberapa sub kegiatan telah mencapai 100%, capaian program secara keseluruhan hanya 77%. Hal ini menunjukkan bahwa:

      a. Program berjalan cukup efektif, namun belum maksimal.
      b. Kegiatan pemberdayaan keluarga menjadi faktor utama yang menurunkan capaian program.
      c. Diperlukan peningkatan strategi pelibatan masyarakat serta evaluasi perencanaan target agar lebih realistis dan terukur.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dari target 100% realisasinya 71,00% sehingga capaian kinerjanya 71,00%

   Adapun Kegiatan dari Program Koordinasi Ketentranman dan Ketertiban Umum yaitu,

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari target 24 Laporan realisasi sebanyak 9 Laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 37,50%
b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dari target 12 Laporan realisasi sebanyak 9 Laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 75,00%

   Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 71,00% berada pada kategori cukup namun belum optimal**.** Faktor utama rendahnya capaian terletak pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang hanya mencapai 37,50%**.**

   Diperlukan perbaikan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar target tahun berikutnya dapat tercapai secara maksimal dan berdampak nyata terhadap stabilitas wilayah kecamatan.

5. Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kertosono pada tahun 2025 dari target 100% realisasi 95,10%, hal ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 95,10%

   Adapaun Kegiatan dari Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dari tanget 9 Lembaga/Organisasi Masyarakat terealisasi 9 Lembaga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,00 %

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan Kertosono Tahun 2025 terealisasi sebesar 95,10% dari target 100%, yang menunjukkan capaian kinerja dalam kategori sangat baik. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah telah terealisasi 9 Lembaga/Organisasi Masyarakat dari target 9 lembaga atau mencapai 100%. Hal ini mencerminkan efektivitas koordinasi dan pembinaan kelembagaan masyarakat di wilayah Kecamatan Kertosono, meskipun masih terdapat beberapa aspek pendukung program yang perlu dioptimalkan untuk mencapai target maksimal.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa dari target 100% realisasi sebesar 55,00% hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 55,00%

   Adapaun kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengawasan Desa yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari target 14 Desa/Kelurahan terealisasi 14 Desa/Kelurahan, hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100,00%

Program Pembinaan dan Pengawasan Desa belum mencapai target (59,26%), meskipun salah satu kegiatan utama telah terealisasi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya berkontribusi terhadap pencapaian indikator program secara keseluruhan. Diperlukan evaluasi pada indikator, mekanisme pengukuran, serta penguatan kualitas hasil pembinaan dan pengawasan desa.

Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja.
(Berdasarkan Renstra 2025-2029)

No.	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kinerja Tahun 2025		
						Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tujuan : Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	-	-	78	72,02	92,33%
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	-	-	91	91,4	100,44%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SAKIP Kecamatan*	75	70,60	94,13%
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9 Dokumen	9,00	100,00%
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah	2 Dokumen	2,00	100,00%
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1,00	100,00%
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD	1 Dokumen	1,00	100,00%

				Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1,00	100,00%
				Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD	1 Dokumen	1,00	100,00%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2,00	100,00%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1,00	100,00%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah	40 Dokumen	38,00	95,00%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/Bulan =	27,00	90,00%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2,00	100,00%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1,00	100,00%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1,00	100,00%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2,00	100,00%
				Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	umlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	0,00	0,00%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	2 Laporan	0,00	0,00%

				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0,00	0,00%
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18 Dokumen	14,00	77,78%
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,00	100,00%
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah DokumenPengamanan Barang MilikDaerah SKPD	1 Dokumen	1,00	100,00%
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	0,00	0,00%
				Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,00	100,00%
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12,00	100,00%
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,00	100,00%
				Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen HasilPemanfaatan Barang MilikDaerah SKPD	1 Dokumen	1,00	100,00%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Dokumen	6,00	75,00%
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0,00	0,00%
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	0,00	0,00%
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0,00	0,00%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1,00	100,00%
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1,00	100,00%

				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30,00	100,00%
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	180,00	90,00%
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	70,00	100,00%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah	54 Dokumen	47,00	87,04%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12,00	100,00%
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu	12 Laporan	12,00	100,00%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	48,00	96,00%
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	4,00	100,00%
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1,00	100,00%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Banaran)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Banaran)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Banaran)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Banaran)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Banaran)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Banaran)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12,00	100,00%
				Penyediaan Bahan/Material (Kelurahan Banaran)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1,00	100,00%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	17 Unit	16,00	94,12%
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7,00	100,00%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	6,00	85,71%
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2,00	100,00%
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1,00	100,00%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Banaran)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0,00	0,00%
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Kelurahan Banaran)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	0,00	0,00%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	49 Laporan	38,00	77,55%
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat	12 Laporan	12,00	100,00%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12,00	100,00%
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,00	100,00%

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Banaran)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12,00	100,00%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Banaran)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12,00	100,00%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	42 Unit	40,00	95,24%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3,00	100,00%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	0,00%
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihar	15 Unit	15,00	100,00%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5,00	100,00%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2,00	100,00%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kelurahan Banaran)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	2,00	66,67%
				Pemeliharaan Mebel (Kelurahan Banaran)	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit	5,80	96,67%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Banaran)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4,00	100,00%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kelurahan Banaran)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4,00	100,00%
2.	Meningkatkan Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	100%	100,00	100,00%
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	2 Laporan	2,00	100,00%

				Tingkat Kecamatan	**Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**			
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**2 Laporan**	**2,00**	**100,00%**
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**2 Laporan**	**2,00**	**100,00%**
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	**Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum**	**2 Dokumen**	**2,00**	**100,00%**
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama**	**4 Laporan**	**4,00**	**100,00%**
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**4 Laporan**	**4,00**	**100,00%**
3.	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan**	**Renstra 2024-2026**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**100%**	**100,00**	**100,00%**
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**18 LembagaKemasyarakatan**	**18,00**	**100,00%**
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**	**9 LembagaKemasyarakatan**	**9,00**	**100,00%**
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	**Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan**	**9 LembagaKemasyarakatan**	**9,00**	**100,00%**
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		**0**	**0,00**	**0,00%**

				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Aktif Dalam Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	150 Keluarga	120,00	80,00%
				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	150 Keluarga	150,00	100,00%
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0	0,00	0,00%
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonoomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	0,00	0,00%
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	21 LembagaKemasyarakatan	21,00	100,00%
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Banaran)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	9 LembagaKemasyarakatan	9,00	100,00%
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Banaran)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	2,00	100,00%
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Banaran)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas /Ormas	10,00	100,00%
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Renstra 2025-2029	-	-	32$	29,47%	92,09%
4.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Renstra 2025-2029	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangan	100%	100%	100,00%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24 Laporan	24,00	100,00%

				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**	**12 Laporan**	**12,00**	**100,00%**
				Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat**	**12 Laporan**	**12,00**	**100,00%**
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**12 Laporan**	**12,00**	**100,00%**
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	**12 Laporan**	**12,00**	**100,00%**
5.	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan**	**Renstra 2025-2029**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**100%**	**100,00%**	**100,00%**
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**9 Lembaga/OrganisasiMasyarakat**	**9,00**	**100,00%**
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**	**100 Orang**	**96,00**	**96,00%**
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	**Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**	**2 Dokumen**	**2,00**	**100,00%**

	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	-	-	78%	92,31%	118,35%
6.	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	Renstra 2025-2029	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	ProsentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang	100%	80,19	96,21%
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang	14 Desa/Kelurahan/23 Dokumen	14	100,00%
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	9,00	100,00%
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Des	8 Dokumen	8,00	100,00%
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Dokumen	2,00	100,00%
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Banaran)	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	4 Dokumen	4,00	100,00%

Berdasarkan Renstra 2025-2029

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui dan dijelaskan hal-hal terkait Capaian Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Kertosono sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota , terkait dengan Nilai SAKIP Kecamatan dari target Nilai 75 tercapai Nilai 70,60
   Dengan ini menunjukan capaian kinerja sebesar 94,13%
   Adapun kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dari target 9 Dokumen realisasi sebanyak 9 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100,00%
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari target 40 Dokumen realisasi sebanyak 38 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 95,00%

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dari target 18 Dokumen realisasi sebanyak 14 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 77,78%
d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat dari target 8 Dokumen realisasi sebesar 6 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 75,00%
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah dari target 54 Dokumen realisasi sebanyak 47,00 Dokumen hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 87,04%
f. Pengadaan Barang Milik Daerah dari target 17 Unit realisasi sebanyak 16 Unit, hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 94,12%
g. Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah dari target 49 Laporan realisasi sebesar 38 Laporan hal ini menunjukan capaian kenerja sebesar 77,55 %
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Daerah dari target 42 Unit realisasi sebesar 40 Unit hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 95,24%.

Capaian Nilai SAKIP Kecamatan sebesar 70,60 dari target 75 atau sebesar 94,13% menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun belum memenuhi target yang ditetapkan. Secara umum kegiatan penunjang telah terlaksana dengan baik, terutama pada aspek perencanaan dan administrasi keuangan. Namun demikian masih terdapat beberapa kegiatan dengan capaian di bawah 80% seperti administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian dan penyediaan jasa penunjang, yang berimplikasi terhadap belum optimalnya dukungan tata kelola internal dalam sistem akuntabilitas kinerja.

2. Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik dari target 100,00% realisasinya 100,00% sehingga capaian kinerjanya 100,00%.

Adapun kegiatan dari Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik capaiannya Adalah sebagai berikut :

d. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dari target 2 Laporan realisasi 2 laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100,00%
e. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dari target 2 Laporan realisasi 2 laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100,00%
f. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dari target 4 Laporan realisasi 4 laporan 100,00%

Analisis Kinerja Secara Keseluruhan

Karena seluruh kegiatan mencapai 100%, maka dapat disimpulkan bahwa Program berjalan efektif**,** Perencanaan dan pelaksanaan selaras, Tidak terdapat hambatan signifikan, Koordinasi internal dan eksternal berjalan baik

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari target 100 % realisasinya 100,00% sehingga capaian kinerjanya 100,00%.
   Hal ini menunjukan kegiatan ini sudah mencapai target sesuai dengan yang telah ditentukan.
   Adapun kegiatanya dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu :
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dari target 18 Lembaga tercapai 18 Lembaga sehingga capaian kinerjanya 100,00%
      Hal ini menunjukan kegiatan ini target sudah tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan
   b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dari target 150 Keluarga hanya tercapai 120 Keluarga sehingga target hanya tercapai 80,00%
   c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dari target 0 Keluarga hanya tercapai 0 Keluarga sehingga target hanya tercapai 0,00%
   d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan target 21 Lembaga Kemasyarakatan realisasi sebanyak 21,00 Lembaga Kemasyarakatan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100,00%
      Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan secara umum telah mencapai target 100%, namun terdapat satu kegiatan yang belum optimal dengan capaian 80%. Oleh karena itu, meskipun indikator kinerja program tercapai, perlu perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas dan jangkauan kegiatan pemberdayaan keluarga agar manfaat program lebih merata dan berkelanjutan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dari target 100% realisasinya 100,00% sehingga capaian kinerjanya 100,00%
   Adapun Kegiatan dari Program Koordinasi Ketentranman dan Ketertiban Umum yaitu,
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari target 24 Laporan realisasi sebanyak 24 Laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100,00%
   b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dari target 12 Laporan realisasi sebanyak 12 Laporan hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100,00%

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum berhasil dilaksanakan secara optimal dengan tingkat capaian kinerja 100%, yang menunjukkan bahwa:

a. Seluruh target kegiatan tercapai sesuai rencana.
b. Program berjalan efektif tanpa kekurangan capaian.
c. Koordinasi lintas sektor di tingkat kecamatan terlaksana dengan baik.
d. Tidak terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan.

5. Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kertosono pada tahun 2025 dari target 100 % realisasi 100,00% , hal ini menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,00%

   Adapaun Kegiatan dari Progran Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dari tanget 9 Lembaga/Organisasi Masyarakat terealisasi 9 Lembaga menunjukkan capaian kinerja sebesar 100,00 %

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Tahun 2025 di Kecamatan Kertosono menunjukkan kinerja sangat baik dengan capaian 100%. Seluruh kegiatan pendukung terlaksana sesuai target, mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas umum pemerintahan di tingkat kecamatan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Desa dari target 100% realisasi sebesar 100,00% hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100,00%

   Adapaun kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengawasan Desa yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dari target 14 Desa/Kelurahan terealisasi 14 Desa/Kelurahan, hal ini menunjukan capaian kinerja sebesar 100,00%

   Capaian kinerja sebesar 100,00% menunjukkan bahwa Program Pembinaan dan Pengawasan Desa terlaksana secara signifikan dan optimal, sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan manajemen program, efektivitas koordinasi, serta komitmen perangkat kecamatan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

B. Realisasai Anggaran

Kecamatan Kertosono pada Tahun 2025 melaksanakan 6 (enam) program dan 19 kegiatan serta mengelola anggaran belanja dengan pagu Rp 5.710.088.789**,-** dengan realisasi sebesar Rp 4.955.350.257,01,- sisa anggaran Rp. 754.738.531,99 atau dengan capaian sebesar 86,78%.

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran (Rp	Sisa Anggaran (Rp	Penyerapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.661.785.500	3.936.043.773	725.741.727	84,43%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.322.250	12.087.500	6.234.750	65,97%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	3.490.000	10.000	99,71%
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	4.000.000	2.850.000	1.150.000	71,25%
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	2.455.000	1.987.000	468.000	80,94%
	Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD	2.500.000	1.483.000	1.017.000	59,32%
	Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	2.118.600	422.000	1.696.600	19,92%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.748.650	290.000	1.458.650	16,58%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	1.565.500	434.500	78,28%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.788.512.000	3.106.983.140	681.528.860	82,01%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.777.262.000	3.096.983.140	680.278.860	81,99%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.500.000	2.500.000	0	100,00%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.250.000	1.250.000	0	100,00%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.250.000	1.250.000	0	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	2.500.000	0	100,00%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.250.000	1.250.000	0	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.250.000	0	1.250.000	0,00%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.250.000	1.250.000	0	100,00%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.992.150	7.115.000	2.877.150	71,21%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.256.500	1.137.000	119.500	90,49%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.265.350	1.248.000	17.350	98,63%
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	#DIV/0!
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2.752.200	1.732.000	1.020.200	62,93%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	718.000	0	718.000	0,00%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.001.700	1.512.000	489.700	75,54%

	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	**1.998.400**	**1.486.000**	**512.400**	**74,36%**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**30.682.200**	**28.782.500**	**1.899.700**	**93,81%**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	**261.500**	**0**	**261.500**	**0,00%**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	**753.000**	**555.000**	**198.000**	**73,71%**
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**996.200**	**420.000**	**576.200**	**42,16%**
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**16.814.000**	**15.950.000**	**864.000**	**94,86%**
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	**8.357.500**	**8.357.500**	**0**	**100,00%**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	**3.500.000**	**3.500.000**	**0**	**100,00%**
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**137.980.400**	**131.537.950**	**6.442.450**	**95,33%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**3.488.500**	**3.483.000**	**5.500**	**99,84%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**4.078.600**	**1.260.000**	**2.818.600**	**30,89%**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	**3.800.000**	**3.800.000**	**0**	**100,00%**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**39.131.800**	**39.050.000**	**81.800**	**99,79%**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**11.100.000**	**9.973.750**	**1.126.250**	**89,85%**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**2.400.000**	**2.400.000**	**0**	**100,00%**
	Penyediaan Bahan/Material	**2.239.000**	**2.000.000**	**239.000**	**89,33%**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**6.750.000**	**6.750.000**	**0**	**100,00%**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**34.216.000**	**33.613.000**	**603.000**	**98,24%**
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**2.572.850**	**2.475.000**	**97.850**	**96,20%**
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**3.750.000**	**2.500.000**	**1.250.000**	**66,67%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Banaran)	**3.550.000**	**3.550.000**	**0**	**100,00%**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Banaran)	**3.495.900**	**3.491.000**	**4.900**	**99,86%**
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Banaran)	**2.750.000**	**2.750.000**	**0**	**100,00%**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Banaran)	**6.385.450**	**6.359.200**	**26.250**	**99,59%**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Banaran)	**3.366.000**	**3.177.000**	**189.000**	**94,39%**
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kelurahan Banaran)	**2.400.000**	**2.400.000**	**0**	**100,00%**
	Penyediaan Bahan/Material (Kelurahan Banaran)	**2.506.300**	**2.506.000**	**300**	**99,99%**
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**151.059.900**	**144.615.000**	**6.444.900**	**95,73%**
	Pengadaan Mebel	**61.402.100**	**60.800.000**	**602.100**	**99,02%**

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**74.023.000**	**68.185.000**	**5.838.000**	**92,11%**
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	**10.481.950**	**10.480.000**	**1.950**	**99,98%**
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**5.152.850**	**5.150.000**	**2.850**	**99,94%**
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Banaran)	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Kelurahan Banaran)	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**254.053.250**	**235.964.953**	**18.088.297**	**92,88%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**78.208.000**	**77.711.134**	**496.866**	**99,36%**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**24.300.000**	**10.869.294**	**13.430.706**	**44,73%**
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**1.713.250**	**1.700.000**	**13.250**	**99,23%**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Banaran)	**9.900.000**	**7.228.525**	**2.671.475**	**73,02%**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Banaran)	**139.932.000**	**138.456.000**	**1.476.000**	**98,95%**
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**271.183.350**	**268.957.730**	**2.225.620**	**99,18%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**36.201.500**	**35.000.000**	**1.201.500**	**96,68%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
	Pemeliharaan Mebel	**8.871.000**	**8.815.000**	**56.000**	**99,37%**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**18.050.000**	**18.030.000**	**20.000**	**99,89%**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**181.021.400**	**180.174.130**	**847.270**	**99,53%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kelurahan Banaran)	**8.991.200**	**8.991.200**	**0**	**100,00%**
	Pemeliharaan Mebel (Kelurahan Banaran)	**3.995.500**	**3.895.000**	**100.500**	**97,48%**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Banaran)	**3.750.000**	**3.750.000**	**0**	**100,00%**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kelurahan Banaran)	**10.302.750**	**10.302.400**	**350**	**100,00%**
2.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**109.848.450**	**108.700.000**	**1.148.450**	**98,95%**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**79.442.550**	**78.964.000**	**478.550**	**99,40%**
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	**79.442.550**	**78.964.000**	**478.550**	**99,40%**
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	**5.406.000**	**5.406.000**	**0**	**100,00%**
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau	**5.406.000**	**5.406.000**	**0**	**100,00%**

	Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**24.999.900**	**24.330.000**	**669.900**	**97,32%**
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	**24.999.900**	**24.330.000**	**669.900**	**97,32%**
3.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**486.581.439**	**475.193.384**	**11.388.055**	**97,66%**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**118.195.000**	**107.902.000**	**10.293.000**	**91,29%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	**33.345.000**	**32.152.000**	**1.193.000**	**96,42%**
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	**84.850.000**	**75.750.000**	**9.100.000**	**89,28%**
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	**0**	**0**	**0**	**0**
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**100,00%**
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**100,00%**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**0**	**0**	**0**	**0**
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonoomi Masyarakat	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**348.386.439**	**347.291.384**	**1.095.055**	**99,69%**
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Banaran)	**4.994.000**	**4.994.000**	**0**	**100,00%**
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Banaran)	**270.062.289**	**269.347.384,01**	**714.905**	**99,74%**
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Banaran)	**73.330.150**	**72.950.000**	**380.150**	**99,48%**
4.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**97.629.000**	**94.821.000**	**2.808.000**	**97,12%**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**83.429.000**	**82.321.000**	**1.108.000**	**98,67%**
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**68.529.000**	**68.021.000**	**508.000**	**99,26%**
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	**14.900.000**	**14.300.000**	**600.000**	**95,97%**
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**14.200.000**	**12.500.000**	**1.700.000**	**88,03%**

	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14.200.000	12.500.000	1.700.000	88,03%
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.400.000	19.400.000	1.000.000	95,10%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	20.400.000	19.400.000	1.000.000	95,10%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.400.000	9.900.000	500.000	95,19%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.000.000	9.500.000	500.000	95,00%
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	333.844.400	321.192.100	12.652.300	96,21%
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	333.844.400	321.192.100	12.652.300	96,21%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19.499.800	18.472.500	1.027.300	94,73%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.848.000	4.848.000	0	100,00%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9.500.000	8.175.000	1.325.000	86,05%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Banaran)	299.996.600	289.696.600	10.300.000	96,57%
JUMLAH		5.710.088.789	4.955.350.257,01	754.738.531,99	86,78%

Analisis Capaian Anggaran Program Perangkat Daerah Tahun 2025

Untuk capaian Anggaran Program Kecamatan Kertosono Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp4.661.785.500,00 terealisasi sebesar Rp3.936.043.773,00 atau penyerapan dana sebesar 84,43%

   Program ini digunakan untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah,

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi 84,43% menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup baik dan efisien. Program ini berperan strategis dalam mendukung kelancaran operasional pemerintahan dan pencapaian kinerja perangkat daerah.

Meskipun belum mencapai 100%, sisa anggaran dapat dikategorikan sebagai bentuk efisiensi sepanjang tidak mengurangi kualitas pelayanan dan capaian kinerja.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan anggaran sebesar Rp109.848.450,00 terealisasi sebesar Rp108.700.000,00 atau penyerapan dana sebesar 98,95%%.

Program ini digunakan untuk kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum serta Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Secara keseluruhan, program ini dapat dikategorikan sangat berhasil dari sisi keuangan dan berpotensi berhasil dari sisi kinerja, dengan catatan evaluasi kualitas output tetap dilakukan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan anggaran Rp486.581.439,00 realisasi Rp475.193.384,00 atau penyerapan anggaran sebesar 97,66%

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Tahun Anggaran berjalan sangat efektif dan efisien, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 97,66%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program telah berjalan optimal serta mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp97.629.000,00 realisasi Rp94.821.000,00, atau penyerapan anggaran sebesar 97,12% Program ini digunakan untuk kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
Secara umum program ini dapat dikategorikan Berhasil secara administratif dan optimal secara pelaksanaan anggaran, dengan catatan evaluasi tetap difokuskan pada dampak nyata terhadap kondisi ketenteraman dan ketertiban wilayah.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp20.400.000,00 realisasi Rp19.400.000,00 atau penyerapan dana sebesar 95,10% Program ini digunakan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum:

a) Tingkat serapan sangat baik (95,10%)
b) Mendukung stabilitas dan koordinasi pemerintahan wilayah
c) Tidak terdapat deviasi signifikan
d) Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.000.000,00

Sehingga dapat disimpulkan bahwa program ini berjalan efektif dan akuntabel, serta mendukung pencapaian tugas umum pemerintahan di Kecamatan.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ini dengan anggaran sebesar Rp333.844.400,00 realisasi Rp321.192.100,00 atau penyerapan dana sebesar 96,21% Program ini digunakan untuk kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan realisasi 96,21% menunjukkan :

a) Kinerja anggaran sangat baik
b) Program berjalan efektif
c) Terdapat efisiensi belanja sebesar 3,79%
d) Mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan desa

Secara umum Capaian/Realisasi Program tahun 2025 dapat memenuhi target kinerja yang diharapkan dan sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Adapun faktor penyebab keberhasilan target kinerja antara lain sebagai berikut :

a. Keberhasilan capaian kinerja ini adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah kecamatan dengan instansi vertikal. Kerjasama tersebut berupa koordinasi, baik secara langsung maupun melalui rapat yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan.
b. Efisiensi penggunaan sumber daya
   Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Forpimcam, Korwil, UPT, Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan desa/kelurahan.
c. Pemberdayaan potensi sumber daya yang ada seoftimal mungkin, sehingga target kinerja dapat tercapai;
d. Masih terdapat kekosongan 2 (dua) pejabat struktural sehingga untuk serapan anggaran tidak maksimal dan realisasi kinerja kurang maksimal.
e. Instruksi Bupati Nomor : 100.3.4.2/189/411.000/2025 tanggal 25 Januari tentang efisiensi dalam anggaran yang berakibat tertundanya penyerapan anggaran
   Kecamatan Kertosono pada Tahun 2025 melaksanakan 6 (enam) program dan 18 kegiatan serta mengelola anggaran belanja sebesar Rp 5.710.088.789,00 telah terserap/terealisasi Rp 4.955.350.257,01 sehingga realisasi yang telah tercapai yaitu 86,78%

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran Kecamatan Kertosono dengan mengacu pada Review Renstra Kecamatan Kertosono Tahun 2024-2026 dan Renstra 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kertosono berpedoman pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 sebahaimana tabel berikut :

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian
1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	**Renstra 2024-2026**	90	91,22	101,36%
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	**Renstra 2024-2026**	30	37,89	126,30%
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	**Renstra 2025-2029**	78	72,02	92,33%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	**Renstra 2025-2029**	91	91,4	100,44%

3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	**Renstra 2025-2029**	32	29,47	92,09%
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	**Renstra 2025-2029**	78	92,31	118,35%

4.2. SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program / kegiatan;
b. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Ngronggot secara menyeluruh,efektif, dan efesien;
c. Menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya

.

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kertosono Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan laporan kami pada tahun mendatang.

Kertosono, 03 Maret 2026
CAMAT KERTOSONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN KERTOSONO

WIDI CAHYONO, SSTP, M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 19790516 199810 1 001

LIST BUKTI DUKUNG LKJIP TAHUN 2025
KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK
RENSTRA 2024-2026

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja 2025
   https://drive.google.com/drive/folders/1QBfgsV_9-dyw8PzMcZKqpMgoq3METPwS
2. Indikator Kinerja Utama
   https://drive.google.com/drive/folders/1KY_VJvIO0ZBvQ7E52DL6S0QS83rrq9wv
3. Dokumen Penganggran /DPA/DPPA Tahun 2025
   https://drive.google.com/drive/folders/1Dv_ZdWK4FpYeu6k4CNIfLiBcrSmeWKOb
4. Dokumen Bukti dukung Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Capaian Renstra 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian	List Bukti Dukung
1	2	3		4	5	6	
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Indeks sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Renstra 2024-2026	78	72,02	92,33%	https://drive.google.com/drive/folders/10ZmUE0ecMzQkZlffy6F5kffTZLRDvCRA
2.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Renstra 2024-2026	90	91,22	101,36%	https://drive.google.com/drive/folders/1V9DN1HEvZy6LbqrCAx2xflKyrBnyor7L
3.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Renstra 2024-2026	30	37,89	126,30%	https://drive.google.com/drive/folders/1jCaqbIMDtX4MwkzOdicNftcrVf8kZ4WT
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai SAKIP Kecamatan*	Renstra 2024-2026	75	70,60	94,13%	https://drive.google.com/drive/folders/1jXtWDrTthJAw1u7D61bciR-raSwK1hU4
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Renstra 2024-2026	9 Dokumen	9,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1Secowe_3x92v5R3eEnIBitFJZHhGyYv6
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah	Renstra 2024-2026	40 Dokumen	38,00	95,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1swhaOBWP2EOzJX9KPF3vZzGkriNUvMbp
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Renstra 2024-2026	18 Dokumen	14,00	77,78%	https://drive.google.com/drive/folders/1rhbTy2tN9dxu8ToZDmVvlsxyUBnm2AX4
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Renstra 2024-2026	8 Dokumen	6,00	75,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1FNyzCGCg9xhJm9HptrhAUjy3R-1xXeR7

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah	Renstra 2024-2026	54 Dokumen	47,00	87,04%	https://drive.google.com/drive/folders/1Hxc5YQDvR-RayjZHygCaVDQ5Cbnsio5_
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	Renstra 2024-2026	17 Unit	16,00	94,12%	https://drive.google.com/drive/folders/1BpFXIoD6r-aGlVZfe3PakggFTBmArvSO
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Renstra 2024-2026	49 Laporan	38,00	77,55%	https://drive.google.com/drive/folders/1bkNlJNWHiQ522CwAX4__4zpHD_I60utX
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	Renstra 2024-2026	42 Unit	40,00	95,24%	https://drive.google.com/drive/folders/1EKcqYL4gt8YlusUB_CnjmWza30-b_s2C
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	Renstra 2024-2026	100%	100,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1vEnb05qqcqC30dqgd5r-IPGXUe--Dez_
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Renstra 2024-2026	2 Laporan	2,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1fvHQmyTdNxU5FuFz3lMlhQMWS-iy1WSV
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Renstra 2024-2026	2 Laporan	2,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1xqvsOdAYHwhSSH8FzytyN33mauGR_I6n
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama	Renstra 2024-2026	4 Laporan	4,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/15GWhGJ4pG8gl7nO5nmQ4-GWWcQna8jES
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	100%	92,00	92,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1bJlzLN_gaViaccshJKc-qiYceJ6bcvW8
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	18 LembagaKemasyarakatan	18,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1wUGob73rnTK7_UP4ZlTKe7Yi1l4ZU-o5
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Aktif Dalam Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Renstra 2024-2026	150 Keluarga	120,00	80,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1vCwlUzHy6atp3lsXZeu8l1kexs61kVxs
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Renstra 2024-2026	0	0,00	0,00%	https://drive.google.com/drive/folders/16SQ7RXCMzpchETTG225GlEQEz1u-C8O7
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	21 LembagaKemasyarakatan	21,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1bMFX967MSdhJ5LVw8baw3tljnNc_gGcG

D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangan	Renstra 2024-2026	100%	82,00	82,00%	https://drive.google.com/drive/folders/17aTLerAkspjk5OPX8AznawKXuEfxv6l6
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Renstra 2024-2026	24 Laporan	24,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1Sgl2ll-BCUdDX8MQDaDUW0bPfZeltXYM
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Renstra 2024-2026	12 Laporan	12,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1xhTR9ULx2q51_tpoOVWtBISBCxzTKvmA
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	100%	95,10%	95,10%	https://drive.google.com/drive/folders/1qDgmu1bywCYMaxrqKrwB2PpJ5HyW1e7-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2024-2026	9 Lembaga/OrganisasiMasyarakat	9,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1ZeqV1YWXdj4u4lbPjHEcj1P8zzqPq4Xx
F.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	ProsentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang	Renstra 2024-2026	100%	80,19	96,21%	https://drive.google.com/drive/folders/1clr7ShnvkN8D-EjO9glUvB0klxkj8Bk8
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang	Renstra 2024-2026	14 Desa/Kelurahan/23 Dokumen	14	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1Yjixh914T9cb8dR1EOqit6eRQmGt3aE4

LIST BUKTI DUKUNG LKJIP TAHUN 2025
KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK
RENSTRA 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target Tahun 2025	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Capaian	List Bukti Dukung
1	2	3		4	5	6	
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Renstra 2025-2029	78	72,02	92,33%	https://drive.google.com/drive/folders/10ZmUE0ecMzQkZlffy6F5kffTZLRDvCRA
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Renstra 2025-2029	91	91,4	100,44%	https://drive.google.com/drive/folders/1V9DN1HEvZy6LbqrCAx2xflKyrBnyor7L

3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Renstra 2025-2029	32	29,47	92,09%	https://drive.google.com/drive/folders/1jCaqblMDtX4MwkzOdicNftcrVf8kZ4WT
4	Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	Renstra 2025-2029	78	92,31	118,35%	https://drive.google.com/drive/folders/16RROuqP3zRk-WbBLwz8kGWx2zDxAjMRJ
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)*	Renstra 2025-2029	75	70,60	94,13%	https://drive.google.com/drive/folders/1jXtWDrTthJAw1u7D61bciR-raSwK1hU4
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Renstra 2025-2029	9 Dokumen	9,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1Secowe_3x92v5R3eEnIBitFJZHhGyYv6
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah	Renstra 2025-2029	40 Dokumen	38,00	95,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1swhaOBWP2EOzJX9KPF3vZzGkriNUvMbp
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Renstra 2025-2029	18 Dokumen	14,00	77,78%	https://drive.google.com/drive/folders/1rhbTy2tN9dxu8ToZDmVvlsxyUBnm2AX4
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Renstra 2025-2029	8 Dokumen	6,00	75,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1FNyzCGCg9xhJm9HptrhAUjy3R-1xXeR7
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah	Renstra 2025-2029	54 Dokumen	47,00	87,04%	https://drive.google.com/drive/folders/1Hxc5YQDvR-RayjZHygCaVDQ5Cbnsio5_
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	Renstra 2025-2029	17 Unit	16,00	94,12%	https://drive.google.com/drive/folders/1BpFXIoD6r-aGlVZfe3PakggFTBmArvSO
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Renstra 2025-2029	49 Laporan	38,00	77,55%	https://drive.google.com/drive/folders/1bkNIJNWHiQ522CwAX4__4zpHD_I60utX
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	Renstra 2025-2029	42 Unit	40,00	95,24%	https://drive.google.com/drive/folders/1EKcqYL4gt8YlusUB_CnjmWza30-b_s2C
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib	Renstra 2025-2029	100%	100,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1vEnb05qqcqC30dqgd5r-lPGXUe--Dez_

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Renstra 2025-2029	2 Laporan	2,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1fvHQmyTdNxU5FuFz3IMlhQMWS-iy1WSV
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Renstra 2025-2029	2 Laporan	2,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1xqvsOdAYHwhSSH8FzytyN33mauGR_l6n
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Cama	Renstra 2025-2029	4 Laporan	4,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/15GWhGJ4pG8gl7nO5nmQ4-GWWcQna8jES
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	Renstra 2025-2029	100%	100,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1bJlzLN_gaViaccshJKc-qiYceJ6bcvW8
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	Renstra 2025-2029	18 LembagaKemasyarakatan	18,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1wUGob73rnTK7_UP4ZITKe7Yi1l4ZU-o5
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga Yang Aktif Dalam Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Renstra 2025-2029	150 Keluarga	120,00	80,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1vCwlUzHy6atp3IsXZeu8l1kexs61kVxs
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Renstra 2025-2029	0	0,00	0,00%	https://drive.google.com/drive/folders/16SQ7RXCMzpchETTG225GlEQEz1u-C8O7
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan	Renstra 2025-2029	21 LembagaKemasyarakatan	21,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1bMFX967MSdhJ5LVw8baw3tljnNc_gGcG
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangan	Renstra 2025-2029	100%	100,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/17aTLerAkspjk5OPX8AznawKXuEfxv6l6
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Renstra 2025-2029	24 Laporan	24,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1Sgl2Il-BCUdDX8MQDaDUW0bPfZeltXYM
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Renstra 2025-2029	12 Laporan	12,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1xhTR9ULx2q51_tpoOVWtBISBCxzTKvmA

E	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2025-2029	100%	100,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1qDgmu1bywCYMaxrqKrwB2PpJ5HyW1e7-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Renstra 2025-2029	9 Lembaga/OrganisasiMasyarakat	9,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1ZeqV1YWXdj4u4IbPjHEcj1P8zzqPq4Xx
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	ProsentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang	Renstra 2025-2029	100%	100,00	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1clr7ShnvkN8D-EjO9gIUvB0klxkj8Bk8
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang	Renstra 2025-2029	14 Desa/Kelurahan/23 Dokumen	14	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1Yjixh914T9cb8dR1EOqit6eRQmGt3aE4

LAMPIRAN 1

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025
dan Perubahan Perjanjian Kinerja 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASHUDI NURUL HUDA, S.STP.MM

Jabatan : CAMAT KERTOSONO

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI HANDOKO TARUNA, S.STP. M.Si

Jabatan : Pj. BUPATI NGANJUK

Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjani akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukanserta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk. 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA Pj. BUPATI NGANJUK	PIHAK PERTAMA CAMAT KERTOSONO
SRI HANDOKO TARUNA, S.STP. M.Si	MASHUDI NURUL HUDA, S.STP.MM Pembina Tingkat I NIP. 19760608 199511 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	90
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.	30%

	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.583.395.866	APBD 2025
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	130.705.000	APBD 2025
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	590.199.439	APBD 2025
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	109.988.200	APBD 2025
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	49.900.000	APBD 2025
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	414.793.300	APBD 2025

Nganjuk. 02 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI NGANJUK

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP. M.Si

PIHAK PERTAMA
CAMAT KERTOSONO

MASHUDI NURUL HUDA, S.STP.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19760608 199511 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GUNAWAN WIBISONO, S.STP**

Jabatan : Plt. **CAMAT KERTOSONO**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md.,S.E.,S.H.,M.M.,M.BA.**

Jabatan : **BUPATI NGANJUK**

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, 8 Oktober 2025

Pihak Kedua, BUPATI NGANJUK	Pihak Pertama, Plt. CAMAT KERTOSONO
Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md.,S.E.,S.H.,M.M.,M.BA.	**GUNAWAN WIBISONO, S.STP** Pembina Tingkat I NIP. 19811007 200012 1 001

LAMPIRAN 2

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2024-2026 dan 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN KERTOSONO

TAHUN 2024-2026

KECAMATAN KERTOSONO
Jl. Basuki Rahmad No. 13 TELP. (0358) 551412 Kertosono
Email : kec.kertosono.ngk@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
Jln. Basuki Rahmat Nomor 12 Kertosono
Telp. (0358) 551412

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188/ 24 /411.506/2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KERTOSONO TAHUN 2024-2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, perlu disusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Kertosono yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 05)
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KERTOSONO TAHUN 2024-2026
KESATU	:	Menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Kertosono sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan atas pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan.
KEEMPAT	:	Indikator Kinerja Utama dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, dokumen perjanjian kinerja, dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 31 – 10 - 2023

a.n. BUPATI NGANJUK
Camat Kertosono

MASHUDI NURUL HUDA, S.STP.MM
Pembina Tk. I
NIP. 197606081995111002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 24 /411.506/2023
TANGGAL : 31 – 10 - 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : KECAMATAN KERTOSONO
TUJUAN : *"Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan"*
SASARAN : SASARAN 1
Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
SASARAN 2
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan

Tugas : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi :
a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. pelaksanaan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KERTOSONO TAHUN 2024-2026

Jabatan : Camat Kertosono

Tugas : Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi :

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan pelaksanaan fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

NO.	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tujuan : Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan adalah penilaian umum yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Kecamatan Kabupaten Nganjuk meliputi penilaian Administrasi, penilaian Presentasi dan penilaian Tinjau Lapang oleh dalam rangka untuk mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamatan dalam menjalankan pemerintahan yang mempertahankan aspek : 1. Aspek Kesejahteraan 2. Aspek Pemberdayaan 3. Aspek Perekonomian 4. Aspek Perencanaan 5. Aspek Hukum 6. Aspek PKK 7. Aspek Trantib 8. Aspek Pemerintahan Dimana penilsian adminidtrasi dilaksanakan dengan mengisi Kertas Kerja penilaian kecamatan dan melengkapi data dukungnya melalui aplikasi Sistem Informasi Kerja Kecamatan (SINCAN) url:satria.ropem.jatimprov.go.id/sincan Sedangkan penilaian tinjau lapang, dilakukan dalam rangka mengkonfirmasi dan validasi administrasi terhadap kertas kerja dan data dukung yang telah dihimpun	Laporan Pelaksanaan Tugas Fasilitsi	Kecamatan Kertosono

	SASARAN :				
1.	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Ruang lingkup Survey Kepuasan Masyarakat meliputi: 1. Persyaratan 2. Prosedur 3. Waktu Pelayanan 4. Biaya/Tarif 5. Produk spesifik jenis pelayanan 6. Kompetensi dari Pelaksana 7. Perilaku dari Pelaksana 8. Maklumat Pelayanan 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan Hasil survey berdasarkan skor dikelompokkan /dikategorikan sebagai berikut : 1. Skor 0-40, kategori Kurang Baik 2. Skor 41-60, kategori Cukup Baik 3. Skor 61-80, kategori Baik Skor 81-100, kategori Sangat Baik	Survei dari masyarakat melalui aplikasi E-Sukma	Kecamatan Kertosono
2.	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang di koordinasikan dengan FORPIMCAM dalam satu tahun _____ x 100 % Jumlah semua pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun	Laporan dari masyarakat (langsung dan via medsos) dan patroli Trantib	Kecamatan Kertosono

a.n. BUPATI NGANJUK
Camat Kertosono

MASHUDI NURUL HUDA, S.STP.MM
Pembina Tk. I
NIP. 19760603 199511002

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
Jl. Basuki Rahmad No. 13 TELP. (0358) 551412 Kertosono
email : kec.kertosono.ngk@gmail.com
www.ngan@ukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 29 /K/411.506/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KERTOSONO BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Bupati;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kertosono.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah:
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 Tentang RPJPD Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN KERTOSONO

PERTAMA	:	Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kecamatan Kertosono dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan;
KEDUA	:	Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kertosono sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Kertosono untuk menetapkan rencana Kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
KETIGA	:	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian Kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk;
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 19 September 2025

a.n. BUPATI NGANJUK
Plt. CAMAT KERTOSONO

GUNAWAN WIBISONO,S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19811007 200012 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 29 /K/411.506/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KERTOSONO

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025-2029
KECAMATAN KERTOSONO

NO.	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tujuan : Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	KONSEP : Sinergitas penyelenggaran di kecamatan adalah kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan guna mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, dan penyelengaraan trantibum serta perlindungan masyarakat.	Hasil Dari Penilaian Aplikasi SINCAN yang di sertakan Dokumen Pendukung sesuai indikator penilaian	Camat Kertosono
				Definisi Operasional : penilaian Sinergisitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan difokuskan pada bidang kreativitas yaitu: (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; (2) Pelaksanaan Tugas Atributif; (3) Pelaksanaan Tugas Delegatif; (4) Tata Kelola Kecamatan; dan (5) Inovasi, dan (6)Tugas Lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.		
				Formulasi : IKM adalah nilai rata-rata untuk komponen (1) Persyaratan; (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; (3) Waktu		

					Penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Produk Spesifikasi jenis pelayanan; (6) Kompetensi pelaksana; (7) Perilaku pelaksana; (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan (9) Sarana dan Prasarana.		
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai	Konsep : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan unit pelayanan publik di kecamatan. IKM menjadi indikator kinerja utama dalam menilai sejauh mana pelayanan yang diterima sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan standar pelayanan yang ditetapkan.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kec. Locoret melalui aplikasi E-Sukma Jatim	Camat Kertosono
				Definisi Operasional : Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).			
				Formulasi : IKM adalah nilai rata-rata untuk komponen (1) Persyaratan; (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; (3) Waktu Penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Produk Spesifikasi jenis pelayanan; (6) Kompetensi pelaksana; (7) Perilaku pelaksana; (8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; dan (9) Sarana dan Prasarana.		
3	Sasaran : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	Konsep : Ini merujuk pada segala bentuk gangguan atau masalah yang dapat merusak ketertiban dan keamanan di masyarakat, baik yang bersifat fisik, sosial, maupun emosional. Biasanya, gangguan ini bisa berupa tindakan kriminal, kerusuhan, atau perilaku yang	Hasil Rekapitulasi Laporan Kejadian dalam satu tahun data dari polsek dan Koramil	Camat Kertosono

					menggangggu kenyamanan dan kelancaran kehidupan sehari-hari warga.				
					Definis Operasional : Penurunan gangguan trantibum adalah selisih jumlah gangguan trantibum dengan jumlah gangguan trantibum pada tahun sebelumnya.				
					Formulasi : Perbandingan dari juhlah gangguan ketentraman dan ketertiban tahun sebelumnya dikurangi Jumlah Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban tahun ini dibagi Tahun ini dikalikan 100 %				
4	Sasaran : Meningkatnya tertib administrasi desa	Persentase Desa tertib administrasi desa	%		Konsep : Desa tertib administrasi desa adalah kondisi di mana sebuah desa mampu mengelola seluruh kegiatan administratifnya secara rapi, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini, desa dianggap tertib administrasi apabila seluruh proses pemerintahan, pengelolaan keuangan, pencatatan, dan pengelolaan data dilakukan dengan sistem yang jelas dan terorganisir dengan baik	Hasil dari Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Binwas)	Camat Kertosono		
					Definisi Operasional : Desa Tertib Administrasi apabila memenuhi syarat"/kriteria sebagai Berikut : 1. Tertib Administrasi Pemerintahan Desa a. Administrasi Umum A b. Administrasi Umum B c.Administrasi Keuangan d Administrasi Pembangunan e Administrasi Kesejahteraan f. Administrasi Pelayanan				

			2. Administrasi BPD 3.Administrasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa 4 Buku Data Profil Desa 5. Peta/Monografi Desa 6 Perpustakaan Desa 7. BUMDes 8. Administrasi LPMD 9 Produk Hukum Desa.			
			Formulasi : Jumlah Desa yang melaksanakan Tertib Administrasi Desa dibagi Jumlah Total Desa dikalikan 100%			

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KERTOSONO

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Sinergitas Kecamatan	Nilai	46,98	78	79	82	84	86	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai	90,55	91	91,5	92	92,5	93	
3	Persentase Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	26,92	32	35	40	45	50	
4	Persentase Desa Tertib Administrasi Desa	%	76	78	80	82	85	87	

Ditetapkan di Nganjuk
Pada Tanggal 19 September 2025

a.n. BUPATI NGANJUK
Plt. CAMAT KERTOSONO

GUNAWAN WIBISONO,S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 19811007 200012 1 001

LAMPIRAN 3

Dokumen Penganggaran DPA/DPPA
Tahun 2025

KABUPATEN NGANJUK

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : MASHUDI NURUL HUDA, SSTP, MM
b. NIP : 197606061995111002
c. Jabatan : CAMAT KERTOSONO

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Nganjuk sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPPA SKPD
Perubahan DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
NIP. 196512271986021001

Nganjuk, Tanggal 02 Januari 2025
Disahkan oleh,

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP. 196505111992022001

KABUPATEN NGANJUK

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7 - UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : 7.01 - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Kertosono

a. Nama : MASHUDI NURUL HUDA, SSTP, MM
b. NIP : 197606081995111002
c. Jabatan : CAMAT KERTOSONO

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP: 196805111992022001

Nganjuk, Tanggal 02 Januari 2025
Pengguna Anggaran

MASHUDI NURUL HUDA, SSTP, MM
NIP: 197606081995111002

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DPA-SKPD
PEMERINTAH KAB. NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025	
Nomor : DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.11.0000/001/2025	
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Kertosono	

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Jumlah (Rp)
			Jumlah Pendapatan	**Rp0,00**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**Rp5.388.177.016,00**
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.569.368.103,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.818.808.913,00
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**Rp490.804.789,00**
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp260.427.789,00
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp159.860.000,00
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp70.497.000,00
			Jumlah Belanja	**Rp5.878.981.805,00**
			Total Surplus/(Defisit)	**(Rp5.878.981.805,00)**
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**Rp0,00**
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**Rp0,00**
			Pembiayaan Neto	**Rp0,00**

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penarikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp613.214.626,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp357.706.729,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp628.654.446,00
April	Rp0,00	April	Rp633.442.859,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp515.960.090,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp691.709.746,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp574.712.726,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp394.898.790,00
September	Rp0,00	September	Rp497.311.065,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp515.050.565,00
November	Rp0,00	November	Rp242.247.971,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp214.070.190,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp5.878.981.805,00**

Nganjuk, Tanggal 02 Januari 2025
CAMAT KERTOSONO

MASHUDI NURUL HUDA, SSTP, MM
NIP. 197606161995111002

Mengesahkan,
PPKD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP. 196805111992022001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Drs. ADAM MUHARTO, A.P., M.Si	197306111993111002	Wakil Ketua	
3.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	196805111992022001	Sekretaris	

KABUPATEN NGANJUK

PERSETUJUAN REKAPITULASI
PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(Perubahan DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah

a. Nama : GUNAWAN WIRESONO, S.STP
b. NIP : 198110072006121001
c. Jabatan : PS. CAMAT KERTOSONO

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Nganjuk sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA-SKPD	Ringkasan Perubahan DPA SKPD
Perubahan DPA-PENDAPATAN SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Disetujui oleh,
Sekretaris Daerah

Dra. NUR SYAIFUDIN, M.Si
NIP. 19651227198903 1001

Nganjuk, Tanggal 20 Oktober 2025
Disahkan oleh, PPKD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP. 196805111992032001

KABUPATEN NGANJUK

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(PERUBAHAN DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2025

URUSAN PEMERINTAHAN	7 - UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN	7.01 - KEGAMATAN
ORGANISASI	7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Kertosono

a. Nama	GUNAWAN WIBISONO, S.STP
b. NIP	198110072000121001
c. Jabatan	Plt. CAMAT KERTOSONO

Kode	Nama Formulir
Perubahan DPA/PENGANTAR SKPD	Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Belanja SKPD
Perubahan DPA-BELANJA SKPD	Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,
PPKD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
NIP 196805111992022001

Nganjuk, Tanggal 20 Oktober 2025
Pengguna Anggaran

GUNAWAN WIBISONO, S.STP
NIP 198110072000121001

PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

Perubahan DPA-SKPD

Nomor : DPPAJA.3/7.01.8.00.0.00.11.0000/001/2025
Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 - Kecamatan Kertosono

Ringkasan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / (Berkurang) (Rp)	(%)
5	1		BELANJA OPERASI	Rp5.351.177.016,00	Rp5.343.185.230,00	(Rp145.991.216,00)	(2,79)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.569.368.103,00	Rp3.777.262.300,00	Rp207.893.897,00	5,50
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.818.808.913,00	Rp1.464.923.200,00	(Rp353.885.713,00)	(24,15)
5	2		BELANJA MODAL	Rp459.804.789,00	Rp467.983.589,00	(Rp22.901.200,00)	(4,89)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp259.427.789,00	Rp237.526.589,00	(Rp22.901.200,00)	(8,64)
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp159.880.000,00	Rp159.880.000,00	Rp0,00	0,00
5	2	04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp70.497.000,00	Rp70.497.000,00	Rp0,00	0,00

Rencana Realisasi Pencairan per Bulan*) (Rp)		Rencana Realisasi Rencana Penerikan Dana per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00	Januari	Rp490.997.742,00
Februari	Rp0,00	Februari	Rp490.443.335,00
Maret	Rp0,00	Maret	Rp643.568.612,00
April	Rp0,00	April	Rp529.027.096,00
Mei	Rp0,00	Mei	Rp606.288.262,00
Juni	Rp0,00	Juni	Rp641.727.612,00
Juli	Rp0,00	Juli	Rp566.606.790,00
Agustus	Rp0,00	Agustus	Rp136.603.138,00
September	Rp0,00	September	Rp97.309.508,00
Oktober	Rp0,00	Oktober	Rp598.468.017,00
November	Rp0,00	November	Rp482.952.187,00
Desember	Rp0,00	Desember	Rp426.118.504,00
Jumlah	**Rp0,00**	**Jumlah**	**Rp5.710.088.789,00**

Nganjuk, Tanggal 20 Oktober 2025
Plt. CAMAT KERTOSONO

GUNAWAN WINSONO, S.STP
NIP. 19811307200812100 1

Mengesahkan
PPKD

Dra. ITYAH SPITA RINI, M.Si
NIP. 19680811199203200 1

LAMPIRAN 4

Dokumen Bukti Dukung Tujuan, Sasaran
Tahun 2024-2026 dan 2025-2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rachmat Nomor 1 Nganjuk, Jawa Timur 64412
Telepon (0358) 323388 Fax (0358) 321111
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 28 November 2025

Nomor : 100/3889/411.000/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan (SKK) Tahun 2025

Kepada
Yth. Camat Se-Kab. Nganjuk
di
N G A N J U K

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Administrasi dan Manajerial Pelaksanaan Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Tahun 2025 pada tanggal 7 November 2025, maka bersama ini kami sampaikan hal sebagaimana berikut :

A. Dasar

1. Ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
2. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/313/K/411.013/2023 tentang Tim Evaluasi Kinerja Kecamatan, Sinergitas Kecamatan dan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

B. Ruang Lingkup

1. Penilaian Administrasi berdasarkan upload data dalam Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) sampai dengan Hari Kamis Tanggal 6 November 2025.
2. Penilaian Indikator Manajerial dari Asisten Pemerintahan dan Kesra.

C. Hasil Penilaian

Hasil Penilaian Administrasi dan Indikator Manajerial sebagaimana berikut :

NO	KECAMATAN	NILAI	PERINGKAT
1.	Ngetos	90,80	I
2.	Ngluyu	87,08	II
3.	Wilangan	86,47	III
4.	Prambon	85,14	IV
5.	Baron	83,51	V
6.	Sawahan	82,23	VI
7.	Jatikalen	80,45	VII
8.	Nganjuk	80,39	VIII
9.	Berbek	80,28	IX

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10.	Patianrowo	79,78	X
11.	Bagor	79,70	XI
12.	Tanjunganom	78,44	XII
13.	Ngronggot	75,09	XIII
14.	Sukomoro	73,03	XIV
15.	Loceret	72,46	XV
16.	Kertosono	72,02	XVI
17.	Rejoso	71,02	XVII
18.	Gondang	68,09	XVIII
19.	Lengkong	65,40	XIX
20.	Pace	61,87	XX

D. Rekomendasi

1. Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi data dukung kinerja yang berkualitas diharapkan kepada Saudara Camat supaya memerintahkan kepada Pejabat di Lingkungan masing masing agar:
   a. Setiap Pejabat atau yang ditugasi agar memahami tugas, pokok dan fungsi;
   b. Memetakan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan;
   c. Tugas pokok dan fungsi yang belum dilaksanakan agar direncanakan langkah tindak lanjut; dan
   d. Hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat agar diiput pada isian Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) dan dilengkapi data dukung.
2. Untuk pengisian Kinerja Kecamatan Tahun 2026 dapat dilakukan input data pada Aplikasi Sistem Informasi Kecamatan (SINCAN) mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2026, diharapkan agar Pejabat atau yang ditugasi mulai saat ini setiap hasil kinerja harus discan. Untuk pemenuhan Capaian Kinerja Renstra Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Nganjuk

Nur Solekan

Tembusan :
Bupati Nganjuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321746 Fax. 323388
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 2 Oktober 2025

Nomor : 000.8.3.4/2827/411.000/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil IKM TW III Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Nganjuk
2. Direktur RSUD Nganjuk
3. Direktur RSUD Kertosono
di
Nganjuk

Menyusuil Surat Sekretaris Daerah Tanggal 5 Agustus 2025 Nomor : 000.8.3.4/2073/411.000/2025 Hal : Hasil IKM TW II Tahun 2025, bersama ini disampaikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Triwulan III Tahun 2025 (Periode 1 Juli s.d 30 September 2025) sebagaimana terlampir.

Demikian, disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Tembusan :
1. Bupati Nganjuk
2. Inspektur Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Tanggal : 2 Oktober 2025
Nomor : 000.8.3.4/2827/411.000/2025

HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TRIWULAN III TAHUN 2025
(Periode 1 Juli s.d 30 September 2025)

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Sekretariat Daerah	89	90,2	87,92	87,64	86,8	98,03	87,36	89,89	89,33	96,31	86,52	A	Sangat Baik
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	82	86,28	82,62	85,98	83,54	96,34	83,23	85,06	84,45	95,73	79,57	B	Baik
3	Inspektorat Daerah	61	86,2	83,2	80,33	81,15	97,95	84,84	84,84	83,61	97,95	81,97	B	Baik
4	Dinas Pendidikan	50	89,6	88	86,5	85	98,5	87,5	89	91	99,5	89,5	A	Sangat Baik
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	790	91,8	88,45	90,6	90,7	95,32	90,54	91,2	91,65	96,58	91,17	A	Sangat Baik
6	Dinas Kesehatan	1870	90,12	90,98	89,34	87,45	96,46	88,36	88,84	89,84	95,71	84,13	A	Sangat Baik
7	Dinas Sosial PPPA	543	90,02	93,6	92,17	83,38	100	91,76	81,77	80,99	99,13	95,53	A	Sangat Baik
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	67	88,35	84,7	85,45	85,82	100	83,21	89,18	89,18	91,79	85,82	A	Sangat Baik
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	160	88,3	86,56	85,47	81,72	99,53	86,88	85,94	85,78	97,19	85,63	B	Baik
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	432	83,61	81,77	81,31	78,24	95,25	81,02	83,1	84,32	96,59	78,47	B	Baik
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	246	89,59	86,59	89,63	85,98	99,9	86,59	88,82	88,01	94,92	85,87	A	Sangat Baik
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	45	88,52	88,89	87,78	83,33	89,44	86,67	89,44	87,78	97,78		A	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	212	88,69	86,08	84,79	83,84	95,75	85,61	88,92	89,27	97,41	86,56	A	Sangat Baik
14	Dinas Tenaga Kerja	294	89,16	86,73	87,16	84,52	97,36	86,39	87,24	88,69	97,36	86,99	A	Sangat Baik
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	224	87,26	85,27	83,93	82,25	95,31	84,82	85,94	87,61	95,65	84,6	B	Baik
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	155	87,1	84,19	86,29	83,06	94,19	85	84,84	85,65	97,9	82,74	B	Baik
17	Dinas Perhubungan	298	90,73	89,09	89,18	88,59	97,9	88,34	90,35	90,18	93,96	89,01	A	Sangat Baik
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	105	90,93	88,33	88,1	88,33	98,57	88,1	88,81	90,95	99,52	87,62	A	Sangat Baik
19	Dinas Lingkungan Hidup	160	90,1	87,66	87,5	87,66	99,38	88,13	87,97	87,97	96,88	87,81	A	Sangat Baik
20	Dinas Pertanian	146	94,22	93,32	93,49	92,12	98,29	93,15	93,32	94,18	97,77	92,29	A	Sangat Baik
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	26	91,99	88,46	93,27	90,38	96,15	89,42	90,38	91,35	99,04	89,42	A	Sangat Baik
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	836	89,88	87,14	86,18	85,05	97,61	85,32	87,83	91,33	97,7	90,79	A	Sangat Baik
23	Satuan Polisi Pamong Praja	14	84,33	78,57	82,14	83,93	98,21	83,93	76,79	75	96,43	83,93	B	Baik
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	66	89,6	86,74	86,74	85,61	94,7	85,23	89,02	90,91	98,11	89,39	A	Sangat Baik
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	113	92,77	90,93	91,81	90,71	98,45	91,59	91,81	91,81	96,02	91,81	A	Sangat Baik
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	45	96,3	97,78	96,67	95,56	98,89	94,44	94,44	95	99,44	94,44	A	Sangat Baik
27	Badan Pendapatan Daerah	204	95,75	95,83	94,85	93,63	99,75	93,87	95,22	95,96	98,65	94	A	Sangat Baik
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24	80,79	73,96	80,21	75	90,63	76,04	77,08	86,46	94,79	72,92	B	Baik
29	Badan Kesatuan Bangsa dan	118	90,18	88,56	86,65	86,44	98,31	86,44	87,71	90,47	99,15	87,92	A	Sangat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
	Politik													Baik
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	222	86,18	83,78	82,55	81,87	96,06	83,22	86,26	87,95	98,54	83,22	B	Baik
31	Kecamatan Bagor	180	87,69	86,11	84,58	82,92	95,83	83,75	86,11	87,92	96,94	85	B	Baik
32	Kecamatan Baron	350	95,06	93,86	93,5	92,14	98,71	94,86	94,57	95,21	99,36	93,36	A	Sangat Baik
33	Kecamatan Berbek	64	83,33	80,86	76,95	78,13	94,92	78,91	81,25	86,72	94,14	78,13	B	Baik
34	Kecamatan Gondang	205	91,18	90,12	87,44	87,07	97,8	88,05	90,49	92,2	98,05	89,39	A	Sangat Baik
35	Kecamatan Jatikalen	81	88,07	85,49	83,64	82,41	96,6	84,26	87,04	89,51	97,53	86,11	B	Baik
36	Kecamatan Kertosono	110	91,87	91,36	85,23	87,27	100	88,41	89,77	92,5	100	92,27	A	Sangat Baik
37	Kecamatan Lengkong	25	96,89	98	99	98	100	97	97	95	99	89	A	Sangat Baik
38	Kecamatan Loceret	17	86,6	83,82	82,35	83,82	95,59	82,35	83,82	83,82	98,53	85,29	B	Baik
39	Kecamatan Nganjuk	556	87,81	84,53	85,79	83,36	99,91	83,27	82,87	93,12	94,78	82,69	B	Baik
40	Kecamatan Ngetos	16	90,97	84,38	89,06	85,94	98,44	89,06	90,63	90,63	98,44	92,19	A	Sangat Baik
41	Kecamatan Ngluyu	109	86,39	87,39	88,3	85,32	100	81,19	84,86	87,39	84,86	78,21	B	Baik
42	Kecamatan Ngronggot	212	99,7	99,53	99,65	99,41	100	99,53	99,53	99,88	100	99,76	A	Sangat Baik
43	Kecamatan Pace	317	96,51	94,56	95,5	96,14	97,24	97,08	97,4	96,85	96,77	97,08	A	Sangat Baik
44	Kecamatan Patianrowo	373	94,11	90,68	95,38	91,49	100	92,09	91,55	97,12	100	88,67	A	Sangat Baik
45	Kecamatan Prambon	85	86,41	85	83,24	84,41	94,41	82,94	86,18	88,82	96,76	83,82	B	Baik
46	Kecamatan Rejoso	258	92,66	93,51	91,96	89,15	99,71	90,79	90,21	90,89	99,52	88,18	A	Sangat Baik
47	Kecamatan Sawahan	49	89,4	85,2	87,24	81,63	100	86,73	88,27	86,73	98,47	90,31	A	Sangat Baik
48	Kecamatan Sukomoro	263	94,98	92,68	94,68	93,54	99,62	94,01	94,2	94,87	96,39	94,87	A	Sangat Baik
49	Kecamatan Tanjunganom	141	89,28	86,52	88,12	85,28	97,16	85,28	87,77	89,89	97,87	85,64	A	Sangat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
														Baik
50	Kecamatan Wilangan	162	83,88	81,94	83,18	84,88	86,11	83,18	82,87	85,96	86,57	80,25	B	Baik
51	Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk	110	83,01	81,14	81,82	79,09	98,41	80,91	83,41	80	83,18	79,09	B	Baik
52	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono	147	94,1	90,31	94,73	92,35	97,11	93,54	93,37	94,05	97,45	94,05	A	Sangat Baik
IKM KAB. NGANJUK TW III 2025														

*Sumber data : Aplikasi Sukma e-jatim (*https://sukma.jatimprov.go.id*)

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KECAMATAN KERTOSONO
TAHUN 2025
(Berdasarkan Renstra 2024-2026)

No.	JUMLAH RESPONDEN			Jumlah	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)			JUMLAH	IKM TAHUN 2025
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III		
1	2	3	4	6	7	8	9	11=(7+8+9)	12=11/4
1	118	109	110	337	91,38	90,40	91,87	273,65	91,22

Kertosono, 31 Desember 2025
CAMAT KERTOSONO

WIDI CAHYONO, SSTP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197905161998101001

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 321746 Fax. 323388
www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 28 Oktober 2025

Nomor : 000.8.3.4/3189/411.000/2025
Sifat : Terbuka
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil IKM TW IV Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kabupaten Nganjuk
2. Direktur RSUD Nganjuk
3. Direktur RSUD Kertosono
di
Nganjuk

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengumpulan Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025, bersama ini disampaikan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Triwulan IV Tahun 2025 (Periode 1 s.d 24 Oktober 2025) sebagaimana terlampir.

Demikian, disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Tembusan :
1. Bupati Nganjuk
2. Inspektur Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Tanggal : 28 Oktober 2025
Nomor : 000.8.3.4/3189/411.000/2025

HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TRIWULAN IV TAHUN 2025
(Periode 1 s.d. 24 Oktober 2025)

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
1	Sekretariat Daerah	25	98,22	96	99	98	100	98	98	96	100	97	A	Sangat Baik
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	46	86,17	82,07	84,24	82,61	96,74	82,61	85,33	84,24	97,83	79,89	B	Baik
3	Inspektorat Daerah	8	93,4	93,75	93,75	75	100	93,75	93,75	96,88	100	93,75	A	Sangat Baik
4	Dinas Pendidikan	103	91,24	88,35	89,08	84,95	99,51	88,59	89,81	92,96	98,79	89,08	A	Sangat Baik
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	26	97,97	94,23	97,12	96,08	100	97,12	96,15	100	100	99,04	A	Sangat Baik
6	Dinas Kesehatan	1504	87,65	87,8	86,29	82,7	95,25	86,4	86,17	86,49	94,38	83,38	B	Baik
7	Dinas Sosial PPPA	1067	99,47	99,98	99,95	99,6	100	99,58	98,97	97,45	99,88	99,79	A	Sangat Baik
8	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	64	89,84	88,28	88,28	88,28	100	88,28	87,89	88,67	89,45	89,45	A	Sangat Baik
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60	88,19	85	86,25	81,67	98,75	86,67	87,92	86,25	96,67	84,58	B	Baik
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	184	83,65	82,34	81,11	81,11	96,6	80,71	83,42	84,24	95,65	67,66	B	Baik
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	81,17	77,78	80,56	77,78	100	75	80,56	77,78	83,33	77,78	B	Baik
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19	88,45	86,84	85,53	82,89	98,68	84,21	88,16	89,47	97,37	82,89	A	Sangat Baik
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	6	88,43	87,5	87,5	79,17	100	87,5	83,33	87,5	100	83,33	A	Sangat Baik
14	Dinas Tenaga Kerja	81	88,92	87,96	84,57	83,02	97,22	85,8	88,58	90,12	96,3	86,73	A	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	16	92,71	89,06	92,19	90,63	95,31	90,63	92,19	93,75	100	90,63	A	Sangat Baik
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65	86,67	82,31	83,85	81,92	95,38	84,62	86,54	85	98,85	81,54	B	Baik
17	Dinas Perhubungan	178	89,39	87,08	88,48	85,25	98,17	85,81	89,33	87,92	96,77	85,67	A	Sangat Baik
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan	96	91,87	90,1	90,1	89,06	99,22	89,58	89,58	91,93	98,44	88,8	A	Sangat Baik
19	Dinas Lingkungan Hidup	39	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A	Sangat Baik
20	Dinas Pertanian	677	95,21	94,35	94,5	93,32	99	93,94	94,5	94,87	98,86	93,54	A	Sangat Baik
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	78	87,82	85,9	85,9	83,33	98,08	85,9	84,94	86,22	97,44	82,69	B	Baik
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	279	89,96	86,92	87,28	85,04	98,03	85,93	86,92	90,23	98,57	90,77	A	Sangat Baik
23	Satuan Polisi Pamong Praja	74	90,54	90,2	89,86	87,16	96,28	89,86	91,22	85,81	95,95	88,51	A	Sangat Baik
24	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	570	87,67	84,96	82,81	84,25	94,12	83,86	87,37	87,59	96,29	85,75	B	Baik
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	117	96,65	94,87	96,15	96,37	99,79	96,37	96,15	96,79	97,44	95,94	A	Sangat Baik
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	36	85,8	81,94	81,94	80,56	99,31	83,33	82,64	82,64	97,92	81,94	B	Baik
27	Badan Pendapatan Daerah	20	94,31	92,5	93,75	91,25	100	91,25	93,75	95	100	91,25	A	Sangat Baik
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	461	89,98	87,58	87,96	85,95	98,05	87,09	88,56	89,43	98,21	86,98	A	Sangat Baik
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39	91,1	88,46	90,38	86,54	98,08	87,18	91,03	91,67	97,44	89,1	A	Sangat Baik
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55	87,17	86,36	87,73	84,09	95	85	84,55	86,36	94,55	80,91	B	Baik
31	Kecamatan Bagor	34	90,52	86,76	86,97	86,76	100	86,76	87,5	90,44	99,26	88,24	A	Sangat Baik
32	Kecamatan Baron	15	92,96	88,33	90	90	100	91,67	93,33	93,33	100	90	A	Sangat Baik
33	Kecamatan Berbek	52	88,84	85,58	84,13	86,54	96,63	85,1	87,98	87,98	97,12	88,46	A	Sangat Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	PERANGKAT DAERAH/ UNIT PELAYANAN PUBLIK	RESPONDEN	IKM	NILAI UNSUR PELAYANAN									MUTU PELAYANAN	KINERJA
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
34	Kecamatan Gondang	29	93,68	92,24	91,38	89,66	98,28	92,24	92,24	93,1	100	93,97	A	Sangat Baik
35	Kecamatan Jatikalen	19	91,37	82,89	90,79	86,84	100	88,16	92,11	94,74	100	86,84	A	Sangat Baik
36	Kecamatan Kertosono	108	93,16	92,82	90,51	91,67	100	91,44	90,51	92,59	100	88,89	A	Sangat Baik
37	Kecamatan Lengkong	21	79,76	77,38	78,57	78,57	90,48	78,57	78,57	80,95	77,38	77,38	B	Baik
38	Kecamatan Loceret	32	86,72	86,72	85,94	85,16	98,44	85,16	85,16	84,38	89,84	79,69	B	Baik
39	Kecamatan Nganjuk	138	89,73	86,41	88,22	85,33	100	84,96	84,78	99,82	93,84	84,24	A	Sangat Baik
40	Kecamatan Ngetos	116	94,2	91,38	93,1	91,81	98,71	93,32	93,32	94,61	98,28	93,32	A	Sangat Baik
41	Kecamatan Ngluyu	144	87,06	83,33	86,11	84,2	100	82,47	82,47	91,84	91,15	81,94	B	Baik
42	Kecamatan Ngronggot	44	99,75	99,43	99,43	99,43	100	99,43	100	100	100	100	A	Sangat Baik
43	Kecamatan Pace	58	82,14	81,47	81,47	80,6	88,79	79,74	79,74	81,47	87,07	78,88	B	Baik
44	Kecamatan Patianrowo	65	95,34	93,08	94,23	94,23	100	93,08	95	93,85	100	94,62	A	Sangat Baik
45	Kecamatan Prambon	163	99,23	99,08	98,93	99,08	99,54	99,23	99,23	99,39	99,69	98,93	A	Sangat Baik
46	Kecamatan Rejoso	366	90,54	90,16	90,64	87,77	99,73	89,28	88,05	89,28	94,33	85,59	A	Sangat Baik
47	Kecamatan Sawahan	51	90,47	88,73	88,24	87,25	96,57	86,76	90,69	90,69	96,57	88,73	A	Sangat Baik
48	Kecamatan Sukomoro	77	95,92	93,83	94,48	94,81	99,03	96,43	94,81	95,78	98,38	95,78	A	Sangat Baik
49	Kecamatan Tanjunganom	10	86,67	85	85	82,5	97,5	82,5	82,5	85	97,5	82,5	B	Baik
50	Kecamatan Wilangan	55	83,69	83,64	84,55	86,36	83,64	81,82	82,73	83,18	84,55	82,73	B	Baik
51	Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk	32	83,51	85,16	85,16	75	92,97	83,59	83,59	81,25	85,94	78,91	B	Baik
52	Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono	103	83,6	75,24	82,77	78,88	97,57	78,64	80,34	81,6	97,33	79,85	B	Baik
	IKM KAB. NGANJUK TW IV 2025	7734	90,36	88,29	89,01	86,96	97,78	88,17	89,08	90,17	96,26	87,46	A	Sangat Baik

*Sumber data : Aplikasi Sukma e-jatim (*https://sukma.jatimprov.go.id*)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keterangan :
U1 = Persyaratan
U2 = Sistem, Mekanisme dan Prosedur
U3 = Waktu Penyelesaian
U4 = Biaya/Tarif
U5 = Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
U6 = Kompetensi Pelaksana
U7 = Perilaku Pelaksana
U8 = Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
U9 = Sarana dan Prasarana

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja
25.00 - 64.99	D	Tidak Baik
65.00 - 76.60	C	Kurang Baik
76.61 - 88.30	B	Baik
88.31 - 100.00	A	Sangat Baik

Sekretaris Daerah,

Nur Solekan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KECAMATAN KERTOSONO
TAHUN 2025
(Berdasarkan Renstra 2025-2029)

Nomor	JUMLAH RESPONDEN				Jumlah	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)				JUMLAH	IKM TAHUN 2025
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	118	109	110	184	521	91,38	90,40	91,87	91,95	365,60	91,40

Kertosono, 31 Desember 2025
CAMAT KERTOSONO

WIDI CAHYONO, SSTP, M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 197905161998101001

DATA KEJADIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN KERTOSONO
TAHUN 2025

CAPAIAN RENSTRA 2024 - 2026

NO	NAMA KEJADIAN	TAHUN		TAHUN 2025			JUMLAH TAHUN 2025
		2023	2024	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Pencurian	5	7	0	1	1	2
2.	Kekerasan/Perkelahian	1	1	0	2	2	4
3.	Penipuan	7	1	0	0	0	0
4.	Narkoba/Miras	15	15	7	0	6	13
5.	Perjuadian	0	0	1	2	0	3
6.	Kecelakaan Lalu Lintas	100	68	5	22	7	34
7.	Kejadian Lain-Lain	2	3	0	2	1	3
JUMLAH		130	95	13	29	17	59

Jumlah Kejadian (Akumulasi Triwulan I s/d Triwulan III)	59
Target	30%
Realisasi	17,89%
Capaian Kinerja	326,30%

Mengetahui,
CAMAT KERTOSONO

WIDI CAHYONO, SSTP, M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 197905161998101001

Kertosono, 31 Desember 2025
Penyusun Data
Kasi Ketentraman, Ketertiban dan
Pemerintahan Umum Kecamatan

SUYOTO, SE
NIP. 196904IC1994031011

DATA KEJADIAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN KERTOSONO
TAHUN 2025

CAPAIAN RENSTRA 2025 - 2029

NO	NAMA KEJADIAN	TAHUN		TAHUN 2025				JUMLAH TAHUN 2025
		2023	2024	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pencurian	5	7	0	1	1	2	4
2.	Kekerasan/Perkelahian	1	1	0	2	2	0	4
3.	Penipuan	7	1	0	0	0	0	0
4.	Narkoba/Miras	15	15	7	0	6	2	15
5.	Perjuadian	0	0	1	2	0	0	3
6.	Kecelakaan Lalu Lintas	100	68	5	22	7	4	38
7.	Kejadian Lain-Lain	2	3	0	2	1	0	3
JUMLAH		130	95	13	29	17	8	67

Jumlah Kejadian (Akumulasi Triwulan I s/d Triwulan IV)	67
Target	32%
Realisasi	29,47%
Capaian Kinerja	92,09%

Mengetahui,
CAMAT KERTOSONO

WIDI CAHYONO, SSTP, M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 197905161998101001

Kertosono, 31 Desember 2025
Penyusun Data
Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum
Kecamatan Kertosono

SUYOTO, SE
NIP. 196904101994031011

REKAITULASI LAPORAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2025
KECAMATAN KERTOSONO

No	Kecamatan	Desa	Jenis Buku Administrasi Desa		Jumlah Desa	Update Buku Adm Desa			Kat.
						Tidak Diisi	Diisi Tidak Lengkap	Lengkap	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kertosono	13 Desa	I. Buku Administrasi Desa	1. Buku Peraturan Di Desa;	13	0	1	12	
				2. Buku Keputusan Kepala Desa;	13	0	1	12	
				3. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;	13	0	1	12	
				4. Buku Aparat Pemerintah Desa;	13	0	0	13	
				5. Buku Tanah Kas Desa;	13	0	1	12	
				6. Buku Tanah di Desa;	13	2	5	6	
				7. Buku Agenda;	13	0	2	11	
				8. Buku Ekspedisi; dan	13	0	2	11	
				9. Buku Lemboran Desa dan Buku Berita Desa.	13	1	5	7	
				10. Buku Lemboran Desa dan Buku Berita Desa	13	1	5	7	
			II. Buku Administrasi Penduduk	1. Buku Induk Penduduk	13	1	5	7	
				2. Buku Mutasi Penduduk Desa	13	1	3	9	
				3. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk	13	1	5	7	
				4. Buku Penduduk Sementara	13	3	7	3	
				5. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga	13	4	7	3	
			III. Buku Administrasi Keuangan	1. Buku APB Desa	13	0	2	11	
				2. Buku Rancana Anggaran Biaya	13	0	1	12	
				3. Buku Kas Pembantu Kegiatan	13	0	1	12	
				4. Buku Kas Umum	13	0	1	12	
				5. Buku Bank Desa	13	0	1	12	
			IV. Buku Administrasi Pembangunan	1. Buku Rancana Kerja Pembangunan Desa	13	0	3	10	
				2. Buku Kegiatan Pembangunan	13	1	4	8	
				3. Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan	13	0	4	9	
				4. Buku Kader Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat	13	1	3	9	
			V. Buku Administrasi Lainnya	1 Buku Badan Permusyawaratan Desa dalam Buku Administrasi Badan Permusyawaratan	13	2	5	6	
				1 Buku Agenda Surat Keluar	13	0	3	10	
				2 Buku Agenda Surat Masuk	13	0	3	10	
				3 Buku Expedisi	13	0	4	9	
				4 Buku Data Inventaris BPD	13	1	9	3	
				5 Buku Laporan Keuangan BPD	13	0	6	7	
				6 Buku Tamu BPD	13	0	1	12	
				7 Buku Data Anggota BPD	13	0	0	13	
				8 Buku Kegiatan BPD	13	0	2	11	
				9 Buku Data Aspirasi Masyarakat	13	0	5	8	
				10 Buku Daftar hadir rapat BPD	13	0	1	12	
				11 Buku Notulen rapat BPD	13	1	0	12	
				12 Buku data Peraturan/ Keputusan BPD	13	0	0	13	
				13 Buku Data Peraturan Desa	13	0	0	13	
				14 Buku Keputusan Musyawarah Desa	13	0	0	13	
				15 Buku Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	13	0	0	13	
				2. Kegiatan Musyawarah Desa dalam Buku Musyawarah Desa	13	1	4	8	
				3. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Lembaga Adat	13	4	5	4	
JUMLAH					546	25	118	404	

Mengetahui,
CAMAT KERTOSONO

WIDI LAHYONO, SSTP, M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 198205232010011020

Kertosono, 31 Desember 2025
Penyusun Data
Kasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

SUKARLIN, SH
NIP. 97405141996021001

DATA KELENGKAPAN PENGISIAN BUKU ADMINISTRASI DESA KECAMATAN KERTOSONO
TAHUN 2025
(RENSTRA 2025 - 2029)

No	Desa	Buku Administrasi Desa	
		Diisi lengkap	Diisi tidak lengkap
1.	DRENGES	√	
2.	JUWONO	√	
3.	BANGSRI	√	
4.	KALIANYAR	√	
5.	TANJUNG	√	
6.	NGLAWAK	√	
7.	KEPUH	√	
8.	TEMBARAK		√
9.	PELEM	√	
10.	KUTOREJO	√	
11.	LAMBANGKUNING	√	
12.	PANDANTOYO	√	
13.	KUDU	√	
Jumlah		12	1

Mengetahui,
CAMAT KERTOSONO

WIDI CAHYONO, SSTP, M.SI
Pembina Tingkat I
NIP. 198205232010011020

Kertosono, 31 Desember 2025
Penyusun Data
Kasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

SUKARLIN, SH
NIP. 974051419960210O1